PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT ADAT KAMPUNG NAGA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi syarat dalam meraih gelar Sarjana Sosial
pada Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Siliwangi

Oleh,

GEMMY LAKSANA PUTRA
NPM 153507147

JURUSAN ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SILIWANGI
2020

PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT ADAT KAMPUNG NAGA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

Oleh,

GEMMY LAKSANA PUTRA
NPM 153507147

Disetujui dan disahkan
Pada Tanggal 2 Desember 2020

Tim Penguji

Tanda Tangan,

Dosen Pembimbing I,

Hendra Gunawan, S.IP., M.Si. ……

NIDN 0413018405

Dosen Pembimbing II,

Fitriyani Yuliawati, S.IP., M.Si. ……

NIDN 0408078402

Dosen Penguji,

Taufik Nurohman, S.IP., M.A. ……

NIP 19840725 201903 1 004

Mengetahui,
Dekan FISIP Universitas Siliwangi,

Dr. H. Iis Marwan, M.Pd.
NIP 196408181990021001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	:	Gemmy Laksana Putra
Nomor Pokok Mahasiswa	:	153507147
Jurusan	:	Ilmu Politik
Fakultas	:	Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Perguruan Tinggi	:	Universitas Siliwangi

Menyakatan bahwa :

- Karya Tulis skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana), baik di Universitas Siliwangi maupun di perguruan tinggi yang lain.
- Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan Pembimbing.
- Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
- Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh, serta sanksi lainnya sesuai dengan aturan yang berlaku di Universitas Siliwangi.

Tasikmalaya, 2 Desember 2020
Yang Membuat Pernyataan,

GEMMY LAKSANA PUTRA
NPM 153507147

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke Hadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah serta kekuatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **"PARTISIPASI POLTIK MASYARAKAT ADAT KAMPUNG NAGA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019".** Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana Sosial pada Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Siliwangi.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan dukungan dan membimbing penulis, baik tenaga, gagasan, maupun pemikiran, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ayahanda dan Ibunda tercinta serta Kakak dan Adik atas doa dan kasih sayang serta semangat yang begitu besar yang tidak ternilai harganya.
2. Dr. H. Iis Marwan, M.Pd. Sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Siliwangi;
3. Fitriyani Yuliawati, S.IP., M.Si. , Sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Siliwangi sekaligus sebagai Pembimbing II, yang telah memberikan banyak masukan untuk kelancaran penyusunan Skripsi ini;
4. Ahmad Satori, S.IP., M.SI. Sebagai Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Siliwangi;
5. Wiwi Widiastuti, S.IP., M.Si. Sebagai Ketua Jurusan Ilmu Politik Universitas Siliwangi;
6. Taufik Nurohman, S.IP., M.A. Sebagai Sekretaris Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Siliwangi, sekaligus sebagai Dosen Penguji skripsi.

7. Hendra Gunawan S.IP., M.Si. Sebagai Dosen Wali, Sekaligus sebagai Pembimbing 1, yang telah memberikan banyak masukan, saran, dan bimbingannya untuk kelancaran penyusunan Skripsi ini;
8. Dosen dan staf Kependidikan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Siliwangi serta keluarga besar mahasiswa Ilmu Politik Universitas Siliwangi khususnya Angkatan 2015 yang menjadi keluarga dan rumah kedua bagi penulis untuk berbagi keluh kesah dan canda tawa;
9. Sahabat terekat seperjuangan Aldi, Anggi, Fajar, Adam, Dena, Faisal, yang selalu mendengarkan cerita dan keluhan penulis, terima kasih atas saran, do'a dan dukungan yang telah diberikan;
10. Seluruh pihak yang penulis tidak bisa cantumkan satu persatu yang ikut serta membantu dalam menyusun skripsi.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak yang penulis harapkan ke depannya.

Atas segala kontribusi yang telah diberikan untuk memotivasi dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak ternilai harganya mendapatkan imbalan dari Allah SWT sebagai amal ibadah.

Tasikmalaya, Desember 2020

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR ..... **i**

DAFTAR ISI ..... **iii**

DAFTAR TABEL ..... **v**

DAFTAR GAMBAR ..... **vi**

ABSTRAK ..... **vii**

ABSTRACT ..... **viii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 6

C. Pembatasan Masalah 6

D. Tujuan Penelitian 6

E. Manfaat Penelitian 7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA **8**

A. Landasan Teori 8

B. Penelitian Terdahulu 18

C. Kerangka Pemikiran 20

BAB III METODOLOGI PENELITIAN **21**

A. Metode Penelitian 21

B. Fokus Penelitian 22

C. Sasaran Penelitian 22

D. Lokasi Penelitian 22

E. Pendekatan Penelitian 22

F. Teknik Penentuan Informan 22

G. Sumber dan Jenis Data 23

H. Teknik Pengumpulan Data 24

I. Metode Analisis Data Validitas Data 25

J. Validitas Data 27

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN **29**

A. Deskripsi Wilayah Penelitian 29

1. Sejarah Singkat Kampung Naga 29

2. Lokasi dan Tofografi Kampung Naga 35

3. Keadaan Umum Desa Adat Kampung Naga 37
4. Deskripsi Informan Penelitian 39
5. Deskripsi Hasil Penelitian Mengenai Partisipasi Mayarakat Adat Kampung Naga dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 40
B. Pembahasan 85
1. Partisipasi Politik Masyarakat Adat Kampung Naga pada pemilihan Umum Tahun 2019 85
2. Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Masyarakat Adat Kampung Naga pada Pemilihan Umum Tahun 2019 87
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 96
A.Kesimpulan 96
B.Saran 97
DAFTAR PUSTAKA 98
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.	Keadaan Umum Desa Adat Kampung Naga	37
Tabel 2.	Profil Informan Penelitian	39
Tabel 3.	Daftar Pemilih Tetap TPS 2 Desa Neglasari	52
Tabel 4.	Matrik Pertanyaan Bagaimana Kegiatan Pemilu Tahun 2019 Dalam Lingkungan Masyarakat Adat Kampung Naga	63
Tabel 5.	Matrik Pertanyaan Apakah Ada Perlakuan Khusus Untuk Pemilih Yang Berasal Dari Lingkungan Adat	67
Tabel 6.	Matrik Pertanyaan Bagaimana Respons Masyarakat Terhadap Pemilu Tahun 2019	70
Tabel 7.	Matrik Pertanyaan Apa harapan Bapak/Ibu kedepannya dengan keikutsertaan masyarakat Adat Kampung Naga untuk kegiatan politik Indonesia	73
Tabel 8.	Rekapitulasi Pelaksanaan Pemilu Tahun 2019 di TPS 2 Kampung Naga	79

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1. Analisis Interaktif (*interactive model of analysis)* …..... 27

Gambar 2. Bentuk Tofografi Kampung Naga 36

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui partisipasi masyarakat adat kampung naga dalam pemilihan umum tahun 2019. Penelitian ini di dasari oleh bagaimana partisipasi politik masyarakat adat kampung naga dalam menghadapi pemilihan umum tahun 2019. Pada pasca Orde Baru, masyarakat adat kampung naga telah diberi kebebasan dalam menentukan pilihan mereka dalam berpartisipasi politik. Meskipun begitu, masyarakat tetap diberi arahan agar tidak salah memilih. Pemangku adat biasanya menganjurkan untuk memilih calon-calon yang dikenal oleh masyarakat kampung naga. Hal tersebut bukan suatu usaha untuk mengintervensi pilihan masyarakat. Masyarakat adat kampung naga tetap memiliki hak untuk memilih siapapun bahkan memiliki hak untuk tidak memilih.

Dalam penelitian ini, peneliti memakai teori partisipasi politik. Penelitian ini berbentuk kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati, dengan pendekatan studi kasus. Yang nantinya menghasilkan bagaimana partisipasi politik di kampung adat naga.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk partisipasi politik yang berkembang pada mereka adalah partisipasi politik Voting (pemberian suara). Hal itu terlihat dari hasil penelitian peneliti terhadap warga dan ternyata setelah digali lebih mendalam, sebagian besar dari warga Kampung Naga bahkan bisa dikatakan seluruh warga disana mangikuti proses politik dalam pemilihan umum 2019. Namun meskipun mereka mengikuti proses pemilihan umum, mereka tetap berpendapat bahwa yang mereka lakukan bukan untuk mendukung atau tidak mendukung pihak manapun, dalam artian mereka bisa dimasukan pada partisipasi politik pasif.

Partisipasi politik masyarakat adat di Kampung Naga menguatkan teori hierarki tingkatan partisipasi politik yang menyebutkan bahwa Kegiatan pemberian suara dapat dianggap sebagai bentuk partisipasi politik aktif yang paling kecil, karena hal itu menuntut suatu keterlibatan minimal, yang akan berhenti jika pemberian suara telah terlaksana. Lagi pula, tanpa melihat adanya pembatasan-pembatasan lainnya, kegiatan pemberian suara itu tidak boleh dibatasi oleh seringnya pemilihan. Dengan demikian berdasarkan dari uraian-uraian diatas, maka dengan memperhatikan partisipasi politik masyarakat Adat Kampung Naga.. Orientasi politik masyarakat Kampung Naga hanya sebatas mengikuti peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah tanpa di iringi dengan pemahaman yang cukup mengenai sistem maupun perjalanan perpolitikan bangsa ini.

Kata Kunci: Partisipasi Politik, Masyarakat Adat, Budaya Politik.

ABSTRACT

This study aims to determine the participation of the adat village of Naga in the 2019 general election. This research is based on how the political participation of the adat village of Naga in facing the 2019 general election. In the post-New Order era, the adat village of Naga has been given freedom in making choices. they participated in politics. Even so, the community is still given direction so that they don't choose wrongly. The adat leader usually recommends choosing candidates known by the people of the Naga village. It is not an attempt to intervene in people's choices. The adat community of the dragon village still has the right to vote for anyone and even has the right not to vote. In this study, researchers used the theory of political participation.

This research is in the form of qualitative research procedures that produce descriptive data in the form of written or spoken words from people and observable behavior, with a case study approach. Which will result in political participation in the Naga custom village.

The results showed that the form of political participation developed on them was Voting political participation (voting). It was seen from the research results of the researchers on the citizens and it turned out that after being excavated more deeply, most of the residents of Kampung Naga could even say all the residents there mangfollow the political process in the election of 2019. But even though they follow the electoral process, they still argue that what they do is not to support or not support any party, in which case they can be entered into passive political participation.

The political participation of indigenous peoples in Kampung Naga strengthened the hierarchy of political participation levels, mentioning that the voting activities could be considered the least form of active political participation, because it was a minimum of involvement, which would cease if the vote was done. Moreover, regardless of the other restrictions, the voting activity should not be limited by frequent elections. Accordingly, based on the explanation above, then by observing the political participation of the indigenous people of Kampung Naga.. The political orientation of Kampung Naga community is limited to following regulations issued by the Government without being accompanied by a sufficient understanding of the system and the politics of this nation.

Keywords: Political Participation, Indigenous Peoples, Political Culture.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Partisipasi politik sangat urgen dalam konteks dinamika perpolitikan dalam suatu masyarakat. Melalui partisipasi poitik yang dilakukan baik oleh setiap individu maupun oleh setiap kelompok masyarakat, maka segala yang menyangkut kebutuhan warga masyarakat secara universal akan dapat di wujudkan. Keikutsertaan seseorang baik secara individu maupun secara kelompok dianggap sebagai faktor penting dalam mewujudkan kepentingan umum. Yang paling ditekankan dalam hal ini terutama sikap dan perilaku masyarakat dalam kegiatan politik. (Elly M. Setiadi & Usman Kolip 2013:127-128).

Melihat realitas yang ada, tingkat partisipasi politik di Indonesia pada saat pemilu tahun 2019 meningkat dibandingkan pemilu sebelumnya. Jika dibandingkan tahun 2014, peningkatan angka partisipasi hampir 10 persen. Viryan menyatakan angka partisipasi 81 persen tersebut melampaui target nasional dari KPU yang menargetkan partisipasi di angka 77,5 persen. Menurut data yang dihimpun KPU, jumlah pemilih Pemilu 2019 yang berada di dalam maupun luar negeri mencapai 199.987.870. Sementara, pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak.

158.012.506.(https://www.theindonesianinstitute.com/meningkatnya-partisipasi-pemilih-dalam-pemilu-2019/)

Peningkatan partisipasi pada Pemilu 2019 menjadi catatan positif, ditengah rapor merah penyelenggaraan pemilu yang dianggap tidak efisien dan memakan korban jiwa petugas KPPS.

Bahkan jauh sebelum pelaksanaan pencoblosan suara, Pemilu 2019 dibayang-bayangi oleh rendahnya partisipasi masyarakat. Hal ini dapat dilihat dengan munculnya gerakan yang mengajak untuk tidak memilih atau "Golput". Gerakan tersebut diinisiasi oleh beberapa kelompok seperti Komunitas 'Saya Milenial Golput' (SGM) serta 'Koalisi Masyarakat Sipil'. Walaupun pada kenyataannya gerakan ini tidak terlalu signifikan dalam mempengaruhi pemilih untuk golput.

Di sisi lain, penulis juga mengutip pendapat McClosky dalam (Budi Suryadi, S.Sos., M.Si. 2007:129) tentang partisipasi politik merupakan kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui proses pemilihan penguasa. Dengan demikian, baik langsung maupun tidak langsung, partisipasi politik juga merupakan bagian dalam proses pembentukan kebijakan umum. Berdasarkan pendapat tersebut, penulis berpendapat bahwa meningkatnya angka partisipasi masyarakat pada Pemilu 2019 juga perlu diikuti dengan peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan lima tahun kedepan.

Partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan tersebut, bukan hanya ditingkat nasional melainkan di semua tingkat pemerintahan. Ruang partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan dapat dilakukan, misalnya, melalui musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) yang

selama ini diterapkan. Diharapkan juga agar partisipasi masyarakat bukan hanya berhenti pada proses pembuatan kebijakan, namun juga pada aspek pengawasan terhadap implementasi kebijakan pemerintah lima tahun ke depan. Dengan demikian, produk kebijakan yang dihasilkan oleh para pejabat yang dipilih oleh rakyat akan bersifat inklusif, akuntabel, relevan, dan transparan.

(https://www.theindonesianinstitute.com/meningkatnya-partisipasi-pemilih-dalam-pemilu-2019/)

Tingginya tingkat partisipasi politik di indonesia pada pemilu 2019 juga dipengaruhi oleh pola pikir masyarakat yang lebih terbuka dan budaya politik yang berkembang dalam masyarakat, salah satunya masyarakat adat. Budaya politik masyarakat kampung adat cenderung bersifat parokial, karena masyarakat kampung adat tipe budaya politik yang paling rendah, maka dalam budaya politik ini masyarakat tidak merasakan bahwa mereka ialah warga negara dari suatu negara, mereka lebih mengidentifikasikan dirinya pada perasaan lokalitas. Tidak terdapat kebanggaan terhadap sistem politik tersebut. Mereka tidak mempunyai perhatian terhadap apa yang terjadi dalam sistem politik, pengetahuannya sedikit tentang sistem politik dan jarang membicarakan masalah-masalah politik.

Salah satu masyarakat kampung adat yang merasakan hal perubahan pada budaya politik adalah masyarakat adat kampung naga. Dimana yang sebelumnya masyarakat adat kampung naga cenderung kepada tipe budaya politik parokial yang dimana masyarakatnya tidak memiliki rasa minat atau kemampuan untuk berpartisipasi dalam politik. Dengan seiringnya

perkembangan jaman yang semakin berkembang masyarakat adat kampung naga sudah mengalami pergeseran tipe budaya politik dari tipe budaya politik parokial menjadi tipe budaya politik subyek.

Dengan bergesernya budaya politik yang tadinya parokial menjadi subyek yang terjadi di masyarakat adat kampung naga, hal ini juga dapat mempengaruhi tingkat partisipasi politik. Perbedaan hal itu sangat dirasakan oleh masyarakat adat kampung naga yang dahulunya mereka selalu mengikuti alur yang sudah di tentukan oleh pemangku adat dalam memilih suatu wakil daerah dan calon presiden dalam pemilu. Pada zaman orde baru misalnya, para pemangku adat mengharuskan masyarakat kampung naga agar mendukung dan memilih calon dari partai atau golongan yang dominan.

Pasca Orde Baru, masyarakat adat kampung naga telah diberi kebebasan dalam menentukan pilihan mereka dalam berpartisipasi politik. Meskipun begitu, masyarakat tetap diberi arahan agar tidak salah memilih. Pemangku adat biasanya menganjurkan untuk memilih calon-calon yang dikenal oleh masyarakat kampung naga. Hal tersebut bukan suatu usaha untuk mengintervensi pilihan masyarakat. Masyarakat adat kampung naga tetap memiliki hak untuk memilih siapapun bahkan memiliki hak untuk tidak memilih.

Budaya politik subyek yang ditunjukkan oleh masyarakat kampung naga bukan semata-mata tentang kebebasan memilih dalam pemilu saja, tetapi ada aturan lain yang diterapkan. Salah satu contohnya adalah di lingkungan kampung adat naga tidak diperbolehkan memasang atribut kampanye salah satu

calon secara dominan. Hal tersebut untuk mencegah adanya persepsi bahwa masyarakat adat kampung naga hanya mendukung salah satu calon dalam pemilu.

Budaya politik subyek adalah suatu bentuk budaya yang berprinsip bahwa anggota masyarakat mereka yang memiliki pengetahuan cukup dan kadang-kadang turut serta dalam aktivitas politik meskipun mereka tidak menentukan proses politik disebut sebagai masyarakat berbudaya subyek. (Kusmayadi, Edi. 2015:19).

Istilah partisipasi seperti telah disinggung di atas, berkaitan erat dengan analisis politik modern negara-negara dunia ketiga atau ada kaitannya dengan pembangunan politik negara-negara berkembang. Maka dalam konteks ini, istilah partisipasi yang diambil dalam bahasa inggris, "participation" yang secara umum dapat diartikan sebagai keikutsertaan warga negara secara aktif dalam aktivitas-aktivitas tertentu. Dalam hal ini menurut pendapat I.L.Pasaribu & B.Simanjuntak, (1986-349) yang membuat rumusan pengertian partisipasi dengan meninjau beberapa dimensi, bahwa partisipasi dapat juga dalam bentuk buah pikiran yang diberikan dalam bentuk pertemuan, anjang sana dan sebagainya. Sedangkan partisipasi dalam bentuk tenaga seperti misalnya kegiatan yang diberikan untuk perbaikan salah satu pembangunan Desa, dan sebagainya. Demikian juga, partisipasi dapat juga dilihat dari keikutsertaan seseorang memberikan harta benda; partisipasi baik itu dalam bentuk keterampilan dan kemahiran dan yang terakhir, adalah berkaitan erat dengan partisipasi dalam bentuk (partisipasi sosial) terlihat seperti, bentuk-bentuk

koperasi, paguyuban, gotong royong, dan sebagainya yang sejenis dengan itu. (P. Anthonius Sitepu 2012:93)

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengetahui partisipasi politik masyarakat adat kampung naga dalam pemilu tahun 2019. Penulis juga ingin mengetahui dampak yang ditimbulkan dari pergeseran budaya politik di kampung adat naga.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini ialah bagaimana Partisipasi politik masyarakat adat kampung naga dalam pemilihan umum tahun 2019 ?

C. Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus, sempurna, dan mendalam maka peneliti memandang permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi variabelnya. Oleh sebab itu, penulis membatasi diri hanya berkaitan dengan "Partisipasi Masyarakat Adat Kampung Naga dalam Pemlihan Umum Tahun 2019".

D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Model partisipasi Politik Masyarakat Adat Kampung Naga Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019

E. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih ilmu, khususnya pada partisipasi politik guna menunjang perkembangan ilmu politik. Selain itu penelitian ini pun diharapkan dapat memperkaya kajian ilmu politik, khususnya pada partisipasi politik dan sistem pemilu.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan serta dapat menyebarluaskan informasi serta masukan tentang Partisipasi Politik Masyarakat Adat Kampung Naga Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. Yang mana dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, pengetahuan kepada partai politik, pengamat politik, akademisi, mahasiswa, serta pihak-pihak lain yang membutuhkan informasi terkait penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Partisipasi Politik

Partisipasi politik amat urgen dalam konteks dinamika perpolitikan dalam suatu masyarakat. Melalui partisipasi poitik yang dilakukan baik oleh setiap individu maupun oleh setiap kelompok masyarakat, maka segala yang menyangkut kebutuhan warga masyarakat secara universal akan dapat di wujudkan. Keikutsertaan seseorang baik secara individu maupun secara kelompok di anggap sebagai faktor penting dalam mewujudkan kepentingan umum. Yang paling di tekankan dalam hal ini terutama sikap dan perilaku masyarakat dalam kegiatan politik yang ada. (Elly M. Setiadi & Usman Kolip 2013:127-128).

Partisipasi politik sebenarnya merupakan suatu konsep yang sangat populer dalam ilmu politik. Namun demikian pengunaannya bermacam-macam sehingga menimbulkan konsep yang berbeda-beda. Sekalipun demikian, sebagian besar sarjana ilmu politik bersepakat bahwa yang dimaksudkan dengan partisipasi politik adalah bagaimana keterlibatan masyarakat atau rakyat banyak di dalam kegiatan-kegiatan politik. Tujuan dari kegiatan-kegiatan politik ini ialah untuk memengaruhi kebijakan pemerintah. Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan-kegiatan politik itu terbagi dalam dua jenis yaitu, *Pertama*, kegiatan-kegiatan politik yang bersifat menimbulkan gugatan atau tuntutan terhadap sistem politik atau

pemerintah. *Kedua,* kegiatan-kegiatan politik yang berupa kegiatan yang mendukung gagasan-gagasan dan kebijakan-kebijakan yang dihasilkan oleh sistem politik atau pemerintah. (Rohaniah dan Efriza 2015:468). Adapun pengertian tentang partisipasi politik menurut para ahli, berikut merupakan beberapa diantaranya :

1. Menurut Herbert Mclosky dalam (Budiarjo. 2008:367) mengemukakan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, baik secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum.
2. Menurut Norman H. Nie dan Sidney Verba dalam (Rohaniah dan Efriza 2015:471)

   Partisipasi Politik adalah kegiatan pribadi warga negara yang legal yang sedikit banyak langsung bertujuan untuk memengaruhi seleksi pejabat-pejabat negara dan/atau tindakan-tindakan yang diambil oleh mereka.
3. Menurut Kevin R. Hardwick dalam (Rohaniah dan Efriza 2015:471)

   Partisipasi politik memberi perhatian pada cara-cara warga negara berinteraksi dengan pemerintah, warga negara berupaya menyampaikan kepentingan-kepentingan mereka terhadap pejabat-pejabat publik agar mampu mewujudkan kepentingan-kepentingan tersebut.

4. Menurut Tommi Legowo dalam (P. Anthonius Sitepu 2012:93)

Yang merumuskan pengertian tentang partisipasi politik sebagai suatu kegiatan dari warga negara yang secara sengaja maupun tidak secara sengaja yang berkaitan erat dengan kebijakan-kebijakan sistem politik atau pemerintah. Dan hal ini dapat dilakukan baik secara individual maupun secara secara berkelompok secara spontan maupun secara dimobilisasi legal maupun ilegal sifatnya.

Tingakatan partisipasi politik. Secara prakteknya, partisipasi politik warga negara di antara negara-negara berbeda-beda, hal ini terjadi karena kondisi sosial politik yang ada di negara tersebut. Namun secara umum tingkat partisipasi politik warga negara diklasifikasikan berdasarkan bentuk piramida, seperti gambar dibawah ini:

Gambar Piramida Partisipasi Politik

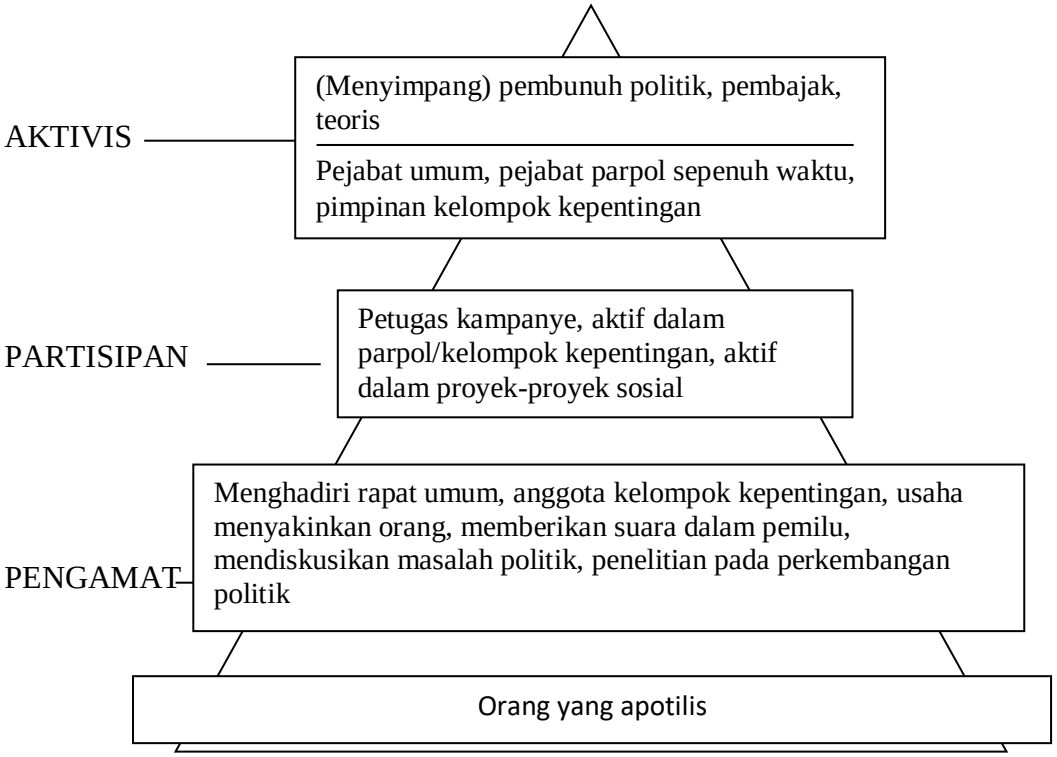

Sumber: Roth dan Wilson, 1980. Dalam (Budi Suryadi, S.Sos., M.Si. 2007:136.)

Roth dan Wilson (1980) dalam (Budi Suryadi, S.Sos., M.Si. 2007:137), menjelaksan bahwa membagi jenis partisipan ini berdasarkan frekuensi dan intensitasnya. Menurutnya orang yang mnegikuti kegiatan secara tidak intensif, yaitu kegiatan yang tidak banyak menyita waktu dan biasanya yang tidak berdasarkan prakarsa sendiri, seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, jumlah orangnya banyak. Sebaliknya, sedikit sekali jumlah orang yang secara aktif dan sepenuh waktu melibatkan diri dalam politik.

9 Tingkatan partisipasi politik

Gambar Hirarkhi Partisipasi Politik

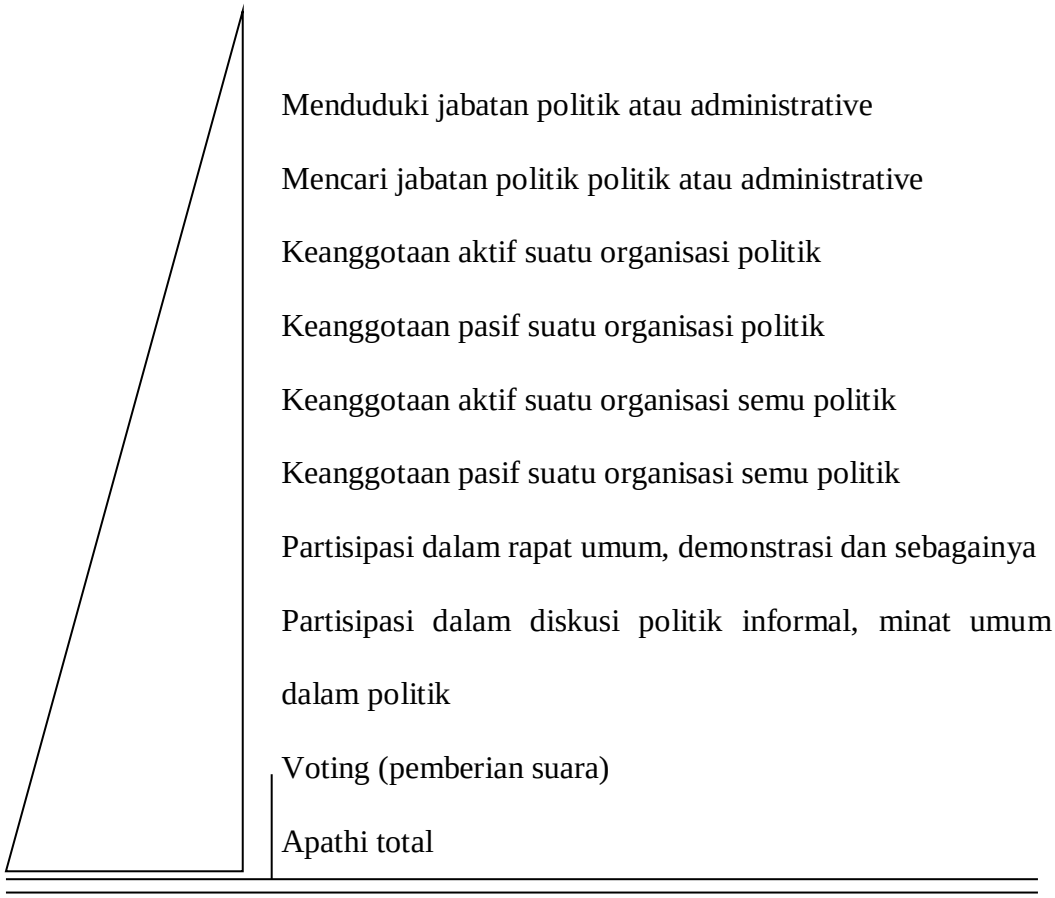

Sumber: dalam buku (Budi Suryadi, S.Sos., M.Si. 2007:139)

Pada puncak hirarkhi terdapat orang-orang yang menduduki berbagai macam jabatan dalam sistem politik, baik pemegang-pemegang jabatan politik maupun anggota-anggota birokrasi pada berbagai tingkatan. Mereka dibedakan dari partisipasi politik lainnya, dalam hal, bahwa pada berbagai taraf mereka berkepentingan dengan pelaksanaan kekuasaan politik yang formal.

Disini penulis akan meneliti tentang model partisipasi politik masyarakat adat kampung naga dalam pemilihan umum tahun 2019, dengan mengunakan hirarkhi partisipasi politik yang nantinya akan ditanyakan

kepada pemengku adat, dan beberapa tokoh penting yang berada di kampung naga.

2. Masyarakat Adat

Masyarakat Adat Menurut AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara) pada Kongres I tahun 1999, adalah: "Komunitas-komunitas yang hidup berdasarkan asal-usul leluhur secara turun-temurun di atas suatu wilayah adat, yang memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam, kehidupan sosial budaya yang diatur oleh Hukum adat dan Lembaga adat yang mengelolah keberlangsungan kehidupan masyarakatnya".

Istilah masyarakat atau masyarakat asli sangat lekat kaitannya dengan sejarah penjajahan di negara-negara dunia oleh negara-negara maju. Anaya (1996:3) dalam buku (Subhan Agung. 2017:16) menyebutkan bahwa wacana masyarakat adat sebenarnya berjalan seiring dengan sejarah kolonialisme modern sekitar abad enam belas. Sejak waktu itulah mereka yang mendiami wilayah yang kemudian dikuasai dan dijajah oleh kaum kolonialis, biasa disebut *indigenous*, *native* atau dalam beberapa literatur disebut *aboriginal*. Saat ini istilah *indigenous* mengacu pada hal yang lebih luas lagi untuk menunjuk kelompok masyarakat yang dianggap sebagai pewaris yang mendiami wilayahnya. Wilayah tersebut telah mereka huni jauh sebelum dijajah oleh bangsa asing.

Penyebutan masyarakat asli atau masyarakat adat *(indigenous populations)* pertama kali digunakan dalam wacana penyebutan penduduk atau populasi adat di penghujung abad delapan belas. Daes dalam bosko

(2006:40) dalam buku (Subhan Agung. 2017:16) menyebutkan bahwa *indigenous people* pertama kali digunakan dalam forum internasional dalam Koferensi Berlin tahun 1884-1885. Pada awalnya konsep tersebut dipakai untuk menyebut penduduk asli atau pribumi di Afrika yang berada di bawah dominasi kolonial yang disebut sebagai Kekuatan Besar *(Great Power)*. Istilah *Great Power* digunakan untuk menyebut para penjajah sebagai pembeda dengan penduduk yang dijajah.

Istilah adat dalam bahasa Indonesia berarti kebiasaan atau tradisi dan berkonotasi aturan yang kalem dan harmonis. Namun, dalam tahun-tahun awal masa reformasi – bahkan terkadang sampai beberapa tahun terakhir – adat seringkali diasosiasikan dengan gerakan, protes dan kerusuhan. Sejak Soeharto lengser tahun 1998, masyarakat berbagai daerah dan etnis di Indonesia telah dengan terang-terangan dan vokal, bahkan kadang secara kasar menuntut penerapan adat setempat di daerah mereka masing-masing. Buku ini menelaah kebangkitan adat dalam perpolitikan Indonesia, mengidentifikasi asal-muasal, faktor historis yang memberinya peluang, dan sebab-musabab yang membuatnya berkembang pesat baru baru ini. Buku ini memberikan pertimbangan apakah kebangkitan adat memberikan kontribusi konstruktif pada kondisi baru perpolitikan yang bersifat plural atau justru akan menjadi potensi kekuatan pemecah yang membahayakan, serta mempelajari implikasinya atas perkembangan demokrasi, hak asasi, masyarakat sipil, dan stabilitas politik.

Ketertarikan pada adat saat ini bukan hanya karena pemahaman atas kesadaran internasional akan hak asasi, tetapi juga merefleksikan secara khusus tradisi ideologi Indonesia yang mempercayai bahwa prasyarat normaitf yang sah untuk sebuah perjuangan politik dapat ditemukan dalam tiga unsur bumi, manusia yang hidup di atasnya, dan kebiasan-kebiasaan manusia itu. Meski kampanye atas nama adat mungkin berhasil mengemborkan ketidakadilan dalam hal hak kepemilikan tanah dan membantu menjaga ketertiban lokal pada saat-saat sulit, usaha untuk menciptakan basis-basis politik berdasarkan adat tampaknya memiliki banyak titik kerawanan. Bahaya tersebut termasuk konflik etnis yang berkepanjangan, legitimasi atas ketidakmerataan sosial, pengingkaran atas hak-hak individu, menjauhnya perhatian atas kewarganegaraan, demokarsi, dan peraturan serta hukum di tataran nasional. (http://obor.or.id/Adat-dalam-Politik-Indonesia).

3. Budaya Politik

Kata budaya atau kultur berasal dari bahasa latin yang berarti merawat, memelihara, atau menjaga. Pada abad ke-17 isitilah *cultura* digunakan selain dalam konteks hubungannya dengan alam, juga berkaitan dengan pengembangan kemampuan spiritual dan kemampuan berfikir. Samuel van Pefendorf, sejarawan jerman, yang menggunakan pertama kali istilah cultura dalam hubungan dengan alam dalam karyanya *De Jure Naturae Et Gentium* (1672) dalam (Dr. Eko Handoyo, M.Si. 2013:222). Dalam abad ke-17 dan ke-18 segala sesuatu yang dihasilkan oleh manusia

untuk menambah apa yang ada secara alamiah pada dirinya maupun lingkungannya dianggap sebagai hasil budaya. Ada perbedaan nyata antara alamiah dan budaya. Yang alamiah berarti segala sesuatu yang ada dengan sendiri nya, apa yang dibawa sejak lahir, sedangkan budaya menunjuk pada segala sesuatu yang diciptakan oleh manusia.

Budaya politik dimaknai sebagai sikap, nilai, informasi dan kecakapan yang dimiliki seseorang kemudian membentuk orientasi individu atau kelompok terhadap proses dan sistem politik. Dengan kata lain, budaya politik menentukan partisipasi seseorang dalam kaitannya dengan proses politik.

Almond dalam (Kusmayadi, Edi 2015:18) menjelaskan berbagai pola orientasi politik yang dikaitkan dengan tinggi rendahnya tingkat partisipasi politik warga masyarakat yang diidentifikasi dalam tiga pola, yaitu *partisipan, subyek, dan parokial*. Warga masyarakat yang berbudaya partisipan adalah warga masyarakat yang memiliki tingkat pengetahuan politik dan tingkat partisipasi politik yang tinggi, serta senantiasa terlibat aktif dalam proses pengambilan keputusan politik atau mempengaruhi proses pengambilan keputusan politik.

Sebaliknya, mereka yang memiliki pengetahuan cukup dan kadang-kadang turut serta dalam aktivitas politik meskipun tidak menentukan proses politik disebut sebagai masyarakat berbudaya subyek. Sementara itu, masyarakat yang tidak aktif dalam politik atau keterlibatannya di dalam politik hanya lima tahun sekali, karena memiliki tingkat pengetahuan politik

yang rendah disebut sebagai masyarakat berbudaya parokial. Dalam (Kusmayadi, Edi 2015:19).

Adapun pengertian tentang Budaya politik menurut para ahli, berikut merupakan beberapa diantaranya:

Budaya politik menurut Almond dan Verba dalam (Dr. Eko Handoyo, M.Si. 2013:225). Menjelaskan bahwa budaya politik mengacu pada orientasi politik, sikap terhadap sistem politik, dan bagian-bagian yang lain serta sikap terhadap peranan itu sendiri.

Ralph Linton dalam (Dr. Eko Handoyo, M.Si. 2013:223). Menjelaskan bahwa budaya politik menekankan ciri historis budaya, seperti warisan sosial atau tradisi sosial.

Lucian Pye dalam (Dr. Eko Handoyo, M.Si. 2013:225). Menjelaskan bahwa budaya politik memiliki indikator-indikator kebudayaan politik suatu bangsa mencakup faktor-faktor seperti wawasan politik, bagaimana hubungan antara tujuan dan cara standar untuk penilaian aksi-aksi politik serta nilai-nilai yang menonjol bagi aksi politik.

B. Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan

1.	Ihsan Fathurrahman, Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jendral Soedirman.	Partisipasi Masyarakat Adat di Kampung Naga.	Penelitian ini membahas bagaimana partisipasi politik masyarakat adat di kampung naga. Fokus kajian menekankan pada Budaya politik dapat tumbuh dan berkembang dalam dimana saja baik dimasyarakat modern, masyarakat tradisional atau masyarakat adat, serta masyarakat primitive. Yang menjadi titik fokus dalam penelitian ini yaitu mengenai budaya politik di masyarakat adat. Masyarakat adat tersebut bisa dikategorikan ke dalam masyarakat (parokial) yaitu masyarakat yang cenderung pasif,tidak kritis terhadap kekuasaan.	Ruang lingkup pembahasan sama-sama membahas tentang partisipasi politik masyarakat adat kampung naga.	Peneliti terdahulu membahas fokus menekankan pada budaya politik dapat tumbuh dan berkembang dalam dimana saja baik dimasyarakat modern,tradisional atau masyarakat adat, serta masyarakat primitive.
2.	Novia Rahmat, program studi Hukum Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.	Pengaruh Kuncen Dalam Masyarakat Adat Kampung Naga, Desa Neglasari Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya dalam Pemilihan Presiden 2014.	Penelitian ini menggunakan penelitian gambaran umum tentang teori kemimpinan kharismatik dan teori keadilan perspektif siyasah. Dalam penelitian ini berisi analisis tentang peran kuncen dalam pemilihan presiden 2014 di Kampung Naga Desa Neglasari Kecamatan Salawu Tasikmalaya.	Ruang lingkup pembahasan sama-sama membahas tentang pemilu dan budaya politik di kampung naga.	Peneliti terdahulu membahas tentang peranan kuncen dalam pemilihan presiden 2014. Peran kuncen dengan menganalisis tindakan kuncen dalam pemilihan presiden 2014 dengan teori kharismatik Max Webber dan tinjauan Budaya Politik dikampung naga yang dianalisi dengan teori

					musyawarah dan keadilan perspektif siyasah.
3.	Riza Faisal, Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia	Budaya Politik Masyarakat Adat Kampung Naga (Studi Kasus di Masyarakat Adat Kampung Naga Kabupaten Tasikmalaya Dalam Pemilihan Gubernur Jawa Barat Tahun 2013).	Peneliti menjelaskan secara rinci tentang tinjauan pustaka atau teori yang digunakan dalam penelitian ini. Teori yang digunakan berkenaan dengan sistem politik, budaya politik, masyarakat adat, serta pemilukada. Peneliti lebih menekankan terhadap pengembangan dari budaya politik itu sendiri, karena pada dasarnya judul yang diusung berkenaan dengan budaya politik.	Ruang lingkup teori yang digunakan sama-sama memakai teori budaya politik dan masyarakat adat.	Peneliti terdahulu lebih menenkankan pembahasan terhadap pengembangan dari budaya politik itu sendiri, karena pada dasarnya judul yang diambil berkenaan dengan budaya politik.

C. Kerangka Pemikiran

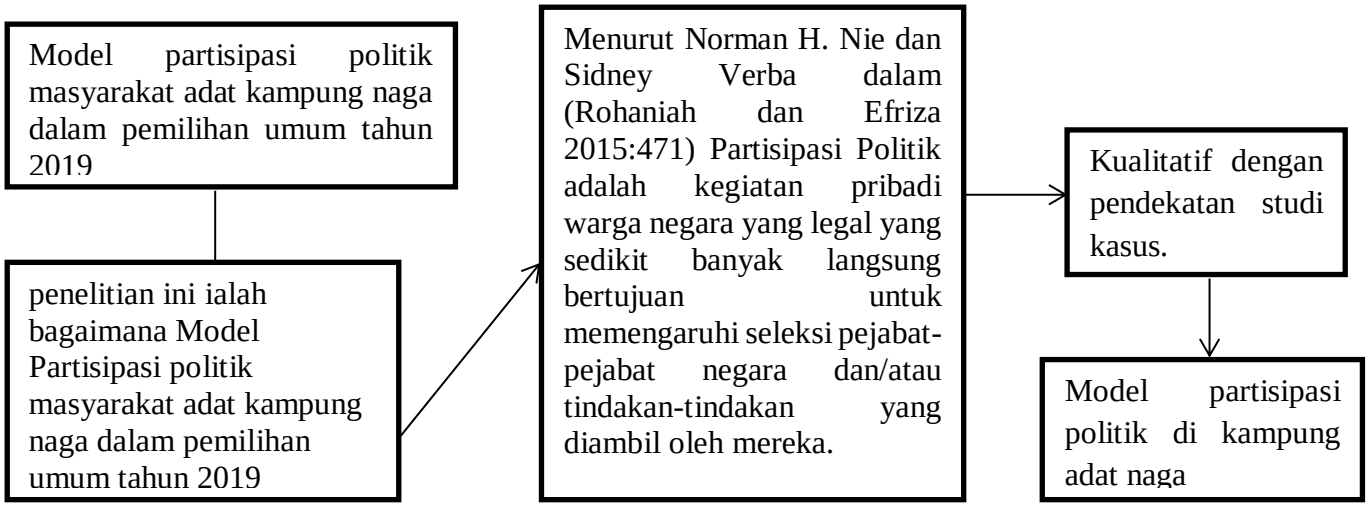

Penetilian ini berjudul model partisipasi politik masyarakat adat kampung naga dalam pemilihan umum tahun 2019, dengan rumusan masalah untuk mengetahui bagaimana model partisipasi politik masyarakat adat kampung naga dalam pemilihan umum tahun 2019. Penelitian ini menggunakan teori partipasi politik menurut Norman H. Nie dan Sidney Verba dalam (Rohaniah dan Efriza 2015:471) Partisipasi Politik adalah kegiatan pribadi warga negara yang legal yang sedikit banyak langsung bertujuan untuk memengaruhi seleksi pejabat-pejabat negara dan/atau tindakan-tindakan yang diambil oleh mereka.

Teori ini digunakan untuk menganalisis hasil temuan dilapangan. Penelitian ini berbentuk kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati, dengan pendekatan studi kasus. Yang nantinya menghasilkan suatu model partisipasi politik.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor (1975), penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Menurut mereka, pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik (utuh). Jadi, dalam hal ini tidak boleh mengisolasikan individu atau organisasi ke dalam variable atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari sesuatu keutuhan. Sejalan dengan definisi tersebut, Kirk dan Miller (1986), mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan social yang secara fundamental bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian bertujuan sebagai berikut :

1. Fokus Penelitian dapat membatasi studi atau dengan kata lain fokus penelitian membatasi bidang inkuiri.
2. Fokus penelitian berfungsi untuk memenuhi kriteria inklusi-eksklusif atau memasukan-mengeluarkan suatu informasi yang diperoleh dilapangan. Melalui bimbingan dan arahan fokus yang telah ditetapkan, seorang peneliti

akan tahu persis data mana yang perlu dimasukan ke dalam data yang sedang dikumpulkan.

Fokus dalam penelitian ini adalah terfokus pada bagaimana partisipasi politik masyarakat adat kampung naga dalam pemilihan umum tahun 2019.

C. Sasaran Penelitian

Sasaran dalam penelitian ini merupakan para informan yang dianggap mengetahui inti permasalahan. Peneliti akan mewawancarai pemengku adat dan para tokoh penting yang berada di Kampung Naga.

D. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan salah satu bentuk pertimbangan peneliti untuk melakukan suatu penelitian. Pertimbangan tersebut berhubungan dengan biaya, tenaga, serta waktu yang nantinya akan digunakan. Lokasi penelitian yang akan dituju oleh peneliti yaitu Desa adat kampung naga yang berada di daerah kabupaten Tasikmalaya, serta lokasi-lokasi yang memungkinkan untuk memperoleh sumber data penelitian.

E. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus

F. Teknik Penentuan Informan

Teknik Penentuan Informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya orang tersebut yang dianggap paling mengetahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia

sebagai orang yang paling menguasi sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek atau situasi sosial yang diteliti, dampaknya adalah data yang dihasilkan sangat berkualitas. (Soegiyono, 2011:216).

G. Sumber dan Jenis Data

1. Sumber Data
   a. Informan

      Informan dipilih secara *purposive* atas dasar permasalahan, judul maupun fokus penelitian.

   b. Dokumen

      Dokumen yaitu catatan-catatan yang berasal dari arsip, buku pedoman pelaksanaan, laporan pelaksanaan, buku maupun arsip yang memuat pendapat maupun teori yang mendukung untuk masalah penelitian.

2. Jenis Data
   a. Data Primer

      Data primer diperoleh dari wawancara langsung dengan para informan dan observasi.

   b. Data Sekunder

      Data sekunder diperoleh dari dokumen atau arsip yang berkaitan dengan penelitian.

H. Teknik Pengumpulan Data

Dalam proses analisis data interaktif penelitian ini kegiatan yang pertama adalah proses pengumpulan data. Kebanyakan data kualitatif adalah data yang berupa kata-kata, fenomena, foto, sikap dan perilaku keseharian yang diperoleh peneliti dari hasil observasi dengan menggunakan alat bantu berupa kamera, perekam suara, *video tape.*

Ada beberapa teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

1. Wawancara mendalam (*indepth interview)*

   Esterberg (2002) menyatakan bahwa wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin menemukan informasi dari responden yang lebih mendalam, teknik ini berdasarkan pada laporan diri sendiri atau setidaknya keyakinan pribadi dan pengetahuannya. Jadi dengan wawancara maka peneliti akan mengetahui hal-hal yang jauh lebih mendalam mengenai partisipan dalam menginterpretasikan situasi ataupun fenomena dimana hal-hal tersebut tidak dapat dikemukakan melalui observasi.

2. Observasi

Observasi atau pengamatan berarti setiap kegiatan yang dilakukan untuk melakukan pengukuran. Akan tetapi observasi disini mengandung makna yang lebih sempit yaitu pengamatan dengan menggunakan indra penglihatan yang berarti tidak mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Observasi atau pengamatan ini dimaksudkan sebagai pengumpulan data secara selektif. Dalam penelitian ini teknik observasi yang dihunakan adalah teknik non *participant observer*, dimana peneliti tidak mengikuti kegiatan objek sehingga dengan mudah dapat mengamati tingkah laku yang muncul. (Soehartono, 2008:68)

3. Dokumentasi

Metode ini merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subjek penelitian. Dimaksudkan untuk mendapatkan data dalam objek penelitian yang dilakukan melalui arsip, foto, dokumen yang kaitannya merupakan data asli objek penelitian yang sedang diteliti.

I. Metode Analisis Data Validitas Data

a. Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan model analisa interaktif (*interactive of model analysis*). Proses analisis ini dilakukan selama proses penelitian.

Dalam teknik ini ada tiga komponen pokok analisis, yaitu *reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan* yang kesemuanya itu difokuskan pada tujuan penelitian. (Milles dan Huberman, 1992:20).

b. Reduksi Data

Merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan, dan abstraksi data yang ada dalam *fieldnote* yang berlangsung terus sepanjang pelaksanaan riset hingga laporan akhir penelitian selesai ditulis. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal yang tidak penting dan mengatur data sedemikian rupa, sehingga kesimpulan akhir dapat dilaksanakan.

c. Penyajian Data

Merupakan kegiatan dengan adanya perencanaan kolom dalam bentuk matriks gambar dan tabel bagi data kualitatif dalam bentuk khususnya. Kegiatan ini dilakukan karena kemampuan manusia sangatlah terbatas dalam menghadapi *fieldnote* yang jumlahnya mencapai ribuan halaman. Dengan demikian, susunan penyajian data yang baik dan jelas sistematikannya sangatlah diperlukan untuk melangkah kepada tahapan penelitian kualitatif.

d. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dapat dilakukan berdasarkan hasil penilitian yang dilakukan dan telah ada dengan memperhatikan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi berupa data-data awal yang belum siap digunakan dalam analisis, setelah data tersebut dideduksi dan disajikan. Proses analisis interaktif dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:

Gambar 1
Analisis Interaktif (*interactive model of analysis)*

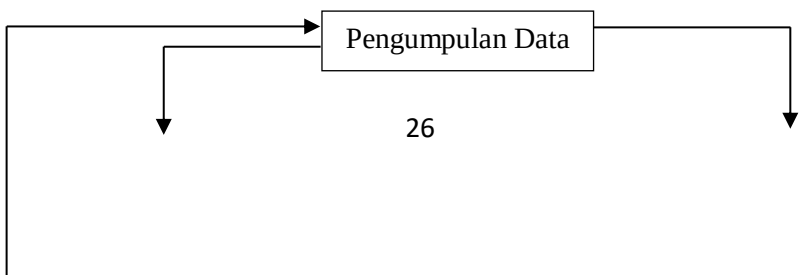

26

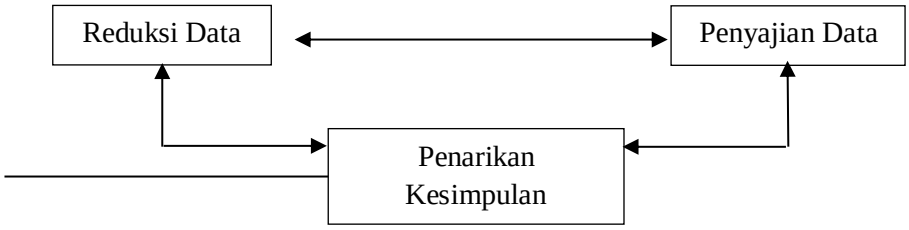

Sumber : Milles dan Huberman, 1992:20

J. Validitas Data

Cara yang digunakan untuk menguji validitas data adalah teknik trianggulasi. Denzin membedakan empat macam Trianggulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori.

a. Trianggulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif.
b. Trianggulasi dengan metode ada dua strategi yang pertama, pengecekan derajat kepercayaan penemuan hasil penelitian beberapa teknik pengumpulan data dan kedua, pengecekan derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama.
c. Trianggulasi dengan penyidik, adalah dengan jalan memanfaatkan peneliti atau pengamat lainnya untuk keperluan pengecekan kembali derajat kepercayaan data.
d. Trianggulasi dengan teori, berdasarkan anggapan bahwa fakta tertentu tidak dapat diperiksa derajat kepercayaannya dengan satu atau lebih teori.

Untuk menguji validitas data dalam penelitian ini digunakan teknik Trianggulasi sumber dalam hal ini dapat ditempuh dengan cara :

a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara.
b. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
c. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu.
d. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang yang memiliki latar belakang yang berlainan.
e. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berlainan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Wilayah Penelitian

1. Sejarah Singkat Kampung Naga

Lokasi Desa Neglasari Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya ± 500 M pinggir Jalan Propinsi Jurusan Tasikmalaya - Bandung lewat Garut. Jarak dari Tasikmalaya ± 30 Km diapit oleh perbukitan membujur dari Timur Ke Barat.

Berdasarkan keterangan bahwa sejarah Kampung Naga ditulis pada sebuah buku dalam bahasa Sansekerta (sansekrit) namun disayangkan bahwa pada sebuah buku peristiwa pembakaran Kampung tersebut oleh G.K.S. sekitar tahun 1956, musnah terbakar termasuk benda -benda Sakral berupa alat-alat senjata yang disimpan di Bumi Ageung dan beberapa yang disimpan oleh para penduduk. Mengungkap sejarah Kampung Naga tanpa berdasarkan/berpegang kepada buku itu oleh Kuncen yang sekarang bernama Saudara Sutija dianggap pelanggaran terhadap keturunan (karuhun).

Yang dimaksud karuhun adalah Sembah Dalem Singaparna yang dimakamkan di komplek Kampung Naga sebelah barat, disebelahnya terdapat 3 makam lainnya yang tidak diketahui namanya dikelilingi pohon – pohon berumur ratusan tahun yang lebat diatas sebuah bukit.

Sedikit yang bisa diceritakan tentang keturunan Sembah Dalem Singaparna beliau mempunyai 6 saudara laki – laki yaitu :

1. Rd. Kagok Katalayah Nu Lencing Sang Seda Sakti Dimakamkan di daerah Taraju Kabupaten Tasikmalaya di warisi Kawedukan (kekebalan).
2. Ratu Kuncung Kudratullah Dimakamkan di Karanggunung Kecamatan Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya, disebut Eyang Mudik Batara Karang diwarisi Kebedasan (kekuatan phisik).
3. Pangeran Mangkubawang Dimakamkan di Mataram (yogyakarta) diwarisi Kepercayaan keduniawian (kekayaan).
4. Sunan Gunung Jati, Kalijaga Dimakamkan di daerah Cirebon diwarisi pengetahuan pertanian.
5. Sunan Gunung komara Dimakamkan di daerah banten diwarisi Kepercayan dan Kepintaran.
6. Pangeran Kudratullah Di makamkan di daerah Gedong Kabupaten Garut diwarisi Pengetahuan agama Islam.

Untuk mendapatkan bahan – bahan authentik pada kira – kira tahun dua puluhan Buku Sejarah tersebut diatas pernah dibawa ke Musium di Jakarta kemudian duplikatnya ada disana.

Keadaan sekarang sudah jauh berubah artinya terbuka bagi orang luar untuk berkunjung tapi dalam hal tradisi bagi lingkungan penduduk disana masih tetap dipertahankan sampai sekarang. Banyak diantaranya

yang sudah mengembara diluar daerah juga telah terjadi perkawinan campuran.

Adat sampai sekarang masih dipertahankan pengaruh Kuncen sebutan Kokolot mempunyai peranan penting dalam kehidupan sehari-hari terutama dalam bulan-bulan tertentu diisi dengan upacara-upacara tradisional. Disini nampak pengaruh Agama Islam faktor utama adalah Ziarah ke Makam Sembah Dalem Singaparna disebutnya Hajat Sasihan.

- Bulan Muharam :

  Diadakan pada tanggal 27 Muharam merupakan Upacara Pengantian Tahun.

- Bulan Mulud :

  Diadakan pada Tanggal 12 Maulud merupakan Upacara membersihkan benda-benda, senjata-senjata dan 4 belah keris yang dianggap sakral baik yang ada di Bumi Ageung sisa yang dibakar GKS maupun yang disimpan penduduk. Pada Upacara itu dibawa dalam buku beralas daun pisang dibawahnya diisi beras.

- Bulan Jumadil Akhir :

  Diadakan pada tanggal 16 dan 17 Jumadil Akhir merupakan Upacara Ngikis (memagari) Makam Sembah Dalem Singaparna.

- Bulan Puasa :

  Diadakan Sabada Ied.

- Bulan Rayagung :

  Diadakan pada tanggal 10 Rayagung.

Mengenai tanggal-tanggal tersebut diatas dapat berubah mengingat dapat dilakukan pada hari-hari tertentu yaitu :

Minggu, Senin, Kamis, Jum;at sedankan hari-hari lainnya tidak boleh dipakai (tabu).

Pada upacara-upacara tersebut diatas pokok upacara adalah ziarah dan setelahnya baru upacara lainnya. Tidak semua turut dalam upacara ziarah malah kaun wanitanya tidak boleh. Pemimpin upacara Kuncen pakaian ditentukan secara Khusus ;

a. Jubah Putih;
b. Ikat Kepala (totopong) pemakainnya sehari-hari penduduk Kampung Naga Pakai ikat Kepala (iket);
c. Bersarung;
d. Tali Pinggang Putih setiap upacara didahului dengan keramas. Hal-hal yang dilarang pada waktu ziarah adalah :
e. Memakai kaos dalam/celana dalam
f. Memakai perhiasan

Menarik sekali bentuk dan konstruksi perumahan semua satu type. Rumah panggung, dinding dari bambu (seseg), atap injuk ukuran hampir sama menghadapi kedua arah ke Selatan atau ke Utara. Bentuk perumahan dan material yang dipergunakan lain dari pada itu tidak boleh (tabu).

Seperti tidak boleh pakai genting, jurei, tidak boleh mempunyai alat-alat perabotan rumah tangga seperti Meubel dan pada Bulan Mulud tidak boleh melakukan perbaikan rumah. Tamu-tamu tidak diterima di

serambi depan dengan beralasankan tikar jadi tidak nampak sama sekali perbedaan ekonomi yang miskin dan kaya. Faktor kemewahan dianggap akan merusak kehidupan.

Umumnya hidup dari hasil pertanian yang sebagian besar di komsumsi sendiri. Disamping itu dari hasil kerajinan tangan anyam-anyaman boboko, topi dan dudukuy galabang untuk perkebunan akan dijual belikan sampai jauh keluar daerah. Sepintas lalu sosial ekonomi relatif lebih rendah dari penduduk kampung lain disekitarnya tapi kenyataannya tidak demikian.

Bagi Kampung Naga berlaku larangan berpakian baju kurung dalam bentuk apapun, tidak boleh bersepatu dan bersandal. Bagi kaum pria pakai iket dan tidak boleh berambut panjang (kecuali wanita). Bagi pengunjung dari luar tidak berlaku ketentuan tersebut.

Disamping hari-hari tertentu yang tidak boleh dipergunakan soal perumahan , pakaian dan tidak boleh menyebut Singaparna nama Kecamatan di Kabupten Tasikmalaya. Mereka menyebut Galunggung hal tersebut dihubungkan dengan nama Sembah Dalem Singaparna.

Berupa senjata-senjata yang disimpan di Bumi Ageung, sebagian habis terbakar pada waktu pembakaran Gerakan Karto Suwiryo (GKS).

Ada beberapa jenis kesenian yaitu :

1. Tembang gembrung umumnya terdiri dari 2 orang tiap irama diikuti nyanyian-nyanyian bahasa Sunda atau Jawa yang isinya berupa pepatah pada upacara Selametan diselingi Ibing.
2. Tembang sajak terdiri dari 5 orang seperti Reog.
3. Angklung, angklung buhun rombongan antara 15-20 orang. Ada indung, engklak, dsb. Alat tabuhan lain dilarang (Tabu) antara lain: kendang dan gong.
4. Pesta / Hiburan Rakyat:
    a. Lauk Kicuhan : upacara marak di kali ?
    b. Ngabagong : Dahulu khusus untuk “Seba” kepada Bupati dengan memakai “jampana”, sekarang tidak demikian, tapi biasa memeriahkan hari-hari nasional bersejarah.

Kuncen merupakan kokolot yang langsung memimpin penduduk, tapi taat terhadap pemerintah. Dalam hal ketaatan ini, menunjukkan kelebihan dari daerah-daerah lainnya, hal ini berkaitan dengan adanya falsafah hidup warisan karuhun :

PARENTAH GANCANG LAKONAN

PANYAUR GEURA TEMONAN

PAMUNDUT GANCANG GAOSAN

Luas areal Kampung Naga + 1,5 ha terdiri dari 102 kepala keluarga jumlah penduduk 325 jiwa. (Sumber : Dispudpar Kab Tasikmalaya dikutif dari Situs Resmi Dispudbad Provinsi Jawa Barat).

2. Lokasi dan Tofografi Kampung Naga

Kampung ini secara administratif berada di wilayah Desa Neglasari, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Lokasi Kampung Naga tidak jauh dari jalan raya yang menghubungkan kota Garut dengan kota Tasikmalaya. Kampung ini berada di lembah yang subur, dengan batas wilayah, di sebelah Barat Kampung Naga dibatasi oleh hutan keramat karena di dalam hutan tersebut terdapat makam leluhur masyarakat Kampung Naga. Di sebelah selatan dibatasi oleh sawah-sawah penduduk, dan di sebelah utara dan timur dibatasi oleh Ci Wulan (Kali Wulan) yang sumber airnya berasal dari Gunung Cikuray di daerah Garut. Jarak tempuh dari kota Tasikmalaya ke Kampung Naga kurang lebih 30 kilometer, sedangkan dari kota Garut jaraknya 26 kilometer. Untuk menuju Kampung Naga dari arah jalan raya Garut-Tasikmalaya harus menuruni tangga yang sudah di tembok (Sunda: sengked) sampai ke tepi sungai Ciwulan dengan kemiringan sekitar 45 derajat dengan jarak kira-kira 500 meter. Kemudian melalui jalan setapak menyusuri sungai Ciwulan sampai kedalam Kampung Naga.

Secara pemerintahan Kampung Naga berada di Dusun Naga, salah satu dari empat dusun di Desa Neglasari, yakni Dusun Naga (lima RT dan dua RW yakni RW 01 dan RW 02), Dusun Tanjak Nangsi (sembilan RT dan tiga RW yakni RW 03, 04, dan O5), Dusun Cikeusik (empat RT dan dua RW yakni RW 06 dan 07), dan Dusun Sukaratu (lima RT dan dua RW yakni RW 08 dan 09).

Gambar 2

Bentuk Tofografi Kampung Naga

Sumber : Hasil Kegiatan Observasi Tanggal 10-14 Februari 2020

3. Keadaan Umum Desa Adat Kampung Naga

Berikut ini terdapat beberapa tabel data untuk menjelaskan keadaan umum di Desa Adat Kamung Naga.

Tabel 1

Keadaan Umum Desa Adat Kampung Naga

Lokasi	Kampung Legok Dage, Desa Neglasari, Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya. 26 km arah barat Kota Tasikmalaya
Luas Area	wilayah adat sekitar 4 hektar wilayah perkampungan sekitar 1.5 hektar
Geografis	Terletak di antara perbukitan tanah Pasundan yang sejuk. Elevasi sekitar 600m dpl. Topografi area kampung berbukit cukup curam. Kepadatan tanah relatif stabil, kondisi tanah subur. Curah hujan cukup banyak.
Penduduk	sekitar 800 orang (2015) warga Sanaga (kampung inti).

Jumlah Bangunan	jumlah rumah di Kampung Naga berjumlah 111, termasuk Balai Pertemuan atau Bale Patemon, Masjid dan Bumi Ageung.
Agama	Islam (semua penduduk)
Mata Pencaharian penduduk	Petani sawah, petani ikan, pengrajin barang-barang seni dan rumah tangga, terutama terbuat dari bambu.

Dengan kondisi rumah yang kesemuanya menghadap ke sebelah Utara atau ke sebelah Selatan dengan memanjang ke arah Barat- Timur. Warga mempunyai orientasi arah sehari-hari yang relatif seragam. Bekerja di kolam atau sawah di bagian bawah atau atas kampung. Kegiatan pembersihan di Sungai Ciwulan yang mengalir di sepanjang sisi kampung dan menjadi bagian yang sangat penting dari prosesi hidup warga. Sementara kegiatan prosesi adat dan keagamaan banyak berorientasi ke Barat arah kiblat sebagai kepatuahan akan ke Islaman mereka.

Pada dasarnya warga Kampung Naga adalah masyarakat Sunda menetap yang sangat mencintai bentang alam di lokasi yang mereka yakini sebagai tempat sejati mereka. Seperti masyarakat Sunda pada umumnya, perangai masyarakat agraris ini sukup lembut, santun, dan menghargai orang lain. Tidak ditemui catatan tentang pertempuran kuno yang menyebut betapa tangguhnya warga Kampung Naga dalam berolah fisik. Pun tidak ditemukan legenda tokoh-tokoh adat yang terkenal sakti dan memiliki keunggulan fisik agresif ataupun beringas seperti misalnya Cak Sakerah di Jawa Timur atau siPitung di Betawi. Mereka menghormati adat istiadat dengan tertib dan menghormati leluhur mereka, Eyang Singaparna.

Sistem pemerintahan desa cukup sederhana, warga berada dalam

satu tingkatan yang sama tanpa membedakan kekayaan ataupun keunggulan spiritual ataupun fisik. Kampung dipimpin oleh Kuncen dan dibantu oleh semacam dewan Tetua Desa terdiri dari Lebe dan Punduh. Nmaun untuk administrasi umum, pemerintah Kabupaten Tsikmalaya menerapkan pula sistem Rukun Tetangga. kampung Naga berada dalam satu wilayah Rukun Warga. Pria berada pada posisi dominan terhadap wanita dalam banyak upacara dan ritus keagamaan, namun dalam kehidupan sehari-hari, pria dan wanita Sanaga berperan dengan sama baiknya.

4. Deskripsi Informan Penelitian

Penelitian ini menggunakan beberapa orang informan yang terdiri atas Pengurus Adat Kampung Naga, Aparatur Pemerintah Desa Neglasari Kecamatan Salawu, serta masyarakat biasa yang bermukim di Kampung Adat Naga. Dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2

Profil Informan Penelitian

Nomor	Nama	Jenis Kelamin	Pekerjaan	Kriteria Informan
1	Ade Suherlan	Laki-Laki	Kuncen	Key Informan
2	Ma'un	Laki-Laki	Punduh Desa	Key Informan
3	Adang Dorodjatun	Laki-laki	Petugas KPPS Desa Neglasari	Key Informan
4	Tati Susilawati	Perempuan	Petugas KPPS Desa Neglasari	Key Informan

5	Encep Solihin	Laki-Laki	Petani	Informan Tambahan
6	Habib	Laki-Laki	Buruh Tani	Informan Tambahan
7	Entin	Perempuan	IRT	Informan Tambahan
8	Sobirin	Laki-Laki	Buruh Tani	Informan Tambahan
9	Amang	Laki-Laki	Pengrajin	Informan Tambahan
10	Aan S	Perempuan	Buruh Tani	Informan Tambahan
11	Dedi Hidayat	Laki-Laki	Buruh Tani	Informan Tambahan
12	Syaiful Zamzam	Laki-Laki	Pengrajin	Informan Tambahan
13	Diki Riswandi	Laki-Laki	Pencari Madu	Informan Tambahan
14	Mang Anda	Laki-Laki	Buruh Tani	Informan Tambahan
15	Nani	Perempuan	IRT	Informan Tambahan

Sumber : Hasil Penelitian Tahun 2019

5. Deskripsi Hasil Penelitian Mengenai Partisipasi Masyarakat Adat Kampung Naga Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019

a. Daftar Pemilih

Tahapan pemutakhiran data dan daftar pemilih adalah salah satu tahap terpenting di dalam Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Presiden tahun 2019, tahap Pemutakhiran Daftar Pemilih untuk Pemilihan umum di atur di dalam Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, menurut pasal 1 ayat 39 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang dimaksud dengan Pemutakhiran Data Pemilih adalah kegiatan untuk memperbaharui data Pemilih berdasarkan DPTdari Pemilu atau Pemilihan Terakhiryang dimutakhirkan secara berkelanjutan dan disandingkan dengan DP4serta dilakukanpencocokan dan penelitianyang dilaksanakan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota dengan dibantu oleh PPK, PPS, dan Pantarlih.

Tahap pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap adalah tahapan terlama selama proses Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Presiden di Kabupaten Tasikmalaya. Pada bulan Agustus dimulai proses Pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap dan tahapan ini berakhir pada bulan Desember 2018 dalam rapat pleno penetapan rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya.

Untuk menetapkan Daftar Pemilih Tetap Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia melakukan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia menerima Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dari Kementrian Dalam Negeri, untuk disinkronkan dengan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Presiden tahun 2014. Menurut pasal 1 ayat 31 Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Daftar Pemilih yang dimaksud dengan DP4 adalah Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu yang selanjutnya disingkat DP4 adalah data yang disediakan oleh Pemerintah berisikan data penduduk yang memenuhi persyaratan sebagai Pemilih pada saat Pemilu diselenggarakan. DP4 yang sudah di sinkronkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia kemudian diturunkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya untuk dilakukan pencocokan dan penelitian.

DP4 yang diperoleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia adalah data mentah yang harus diolah kembali karena banyak yang tidak sesuai dengan ketentuan syarat pemilih, seperti pemilih yang tidak dikenal, pemilih yang sudah pindah tempat tinggal, pemilih yang sudah meninggal dunia, pemilih yang masih dibawah umur atau pemilih yang memiliki status sebagai anggota TNI/Polri. DP4 yang diterima oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya kemudian dipetakan kembali, pemetaan ini dilakukan oleh PPS, data pemilih yang telah di petakan oleh PPS ini kemudian dibagi lagi kedalam TPS – TPS untuk dilakukan validasi terhadap data pemilih. Kemudian dilakukan pencocokan kembali (Coklit) untuk mengurangi pemilih yang tidak memenuhi syarat dan memasukkan pemilih yang sudah memenuhi

syarat. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya melakukan Coklit pada tanggal 9 September 2018 sampai dengan 7 Oktober 2018. Persiapan Coklit yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya antara lain :

1. Melakukan sosialisasi kepada aparat desa/kelurahan, tokoh masyarakat, dan masyarakat luas tingkat desa/kelurahan mengenai kegiatan pemutakhiran daftar pemilih
2. Memastikan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) telah dibentuk
3. Bersama-sama PPDP mengikuti Bimbingan Teknis/Bimtek pemutakhiran data pemilih yang diselenggarakan oleh PPK
4. Memastikan PPDP telah mengerti dan memahami ketentuan SOP
5. Memastikan telah menerima data pemilih per TPS (Model A-KWK) dalam bentuk *soft copy* dan *Hard Copy* beserta seluruh dokumen pemutakhiran data pemilih sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan
6. Menyerahkan data pemilih per TPS (Model A-KWK) dan dokumen lainnya kepada masing-masing PPDP
7. Melakukan Koordinasi dengan PPDP mengenai tata cara pencocokan dan penelitian data pemilih khususnya bagaimana melakukan pencoretan, perbaikan data, mendaftar pemilih baru, cara pengisian formulir dan tenggat waktu yang harus diselesaikan. Koordinasi ini dilaksanakan paling lambat 1 hari sebelum coklit sekaligus untuk mengecek kesiapan dan pemahaman PPDP

8. Memastikan PPDP menyusun jadwal coklit.

Proses Pencocokan Kembali (Coklit) yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya melalui Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Petugas Pemutakhiran Daftar Pemilih (Pantarlih), Sesuai dengan pasal 1 ayat 10 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2016 menyatakan bahwa Pencocokan dan Penelitian yang selanjutnya disebut Coklit adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pantarlih dalam pemutakhiran data Pemilih dengan cara mendatangi Pemilih secara langsung.

Sebelum melakukan pencocokan dan penelitian terhadap Data Pemilih (Model A-KWK) PPDP harus memastikan beberapa hal berikut :

1. Menerima dan memeriksa seluruh dokumen dan peralatan yang dibutuhkan untuk coklit, jenis dokumen dan perlengkapan yang dibutuhkan PPDP dalam proses coklit adalah:
    a) Data Pemilih tiap TPS (Model A.KWK) yaitu Daftar Pemilih yang disampaikan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk dicoklit
    b) Data pemilih baru (Model A.A.KWK) yaitu formulir kosong untuk mencatat pemilih yang belum terdaftar pada model A-KWK
    c) Formulir data telah terdaftar (Model A.A.1.KWK) tanda terima rangkap dua sebagai bukti telah didaftar.

d) Stiker terdaftar (Model A.A.2.KWK) Stiker yang ditempel di rumah pemilih

2. Mempelajari seluruh dokumen dan memastikan Pantarlih paham fungsi dan kegunaan setiap formulir
3. Membuat rencana kerja atau target kerja agar coklit dapat dilaksakan tepat waktu.

Setelah Pantarlih melakukan persiapan Coklit, selanjutnya adalah tahapan Coklit yang dilakukan oleh Pantarlih :

1) Hari pertama kegiatan coklit, Pantarlih mendatangi ketua RT/RW dan/atau tokoh masyarakat setempat untuk mengecek data pemilih dalam model A-KWK;
   a) Pantarlih menanyakan pada ketua RT/RW apakah terdapat perubahan data penduduk terbaru di wilayah ketua RT/RW yang disebebkan warga pindah, pendatang, meninggal dan sebagainya;
   b) Pantarlih meminta kepada ketua RT/RW memeriksa setiap KK apakah benar berdomisili di area tersebut.
   c) Pantarlih membacakan atau menyebutkan nama – nama anggota keluarga Ketua RT/RW yang telah terdaftar dalam model A-KWK
   d) Pantarlih meminta kepada Ketua RT/RW untuk memeriksa model A- KWK apakah semua anggota keluarga sudah terdaftar atau belum dan memastikan data sudah benar dan valid.

2) Setelah melakukan pengecekan awal dengan Ketua RT/RW dan tokoh- tokoh masyarakat, kemudian Pantarlih melakukan pencocokan dan penelitian ke rumah-rumah warga berikutnya;
    a) Pantarlih membacakan atau menunjukkan nama – nama anggota keluarga pemilik rumah yang sedang di coklit yang terdaftar di dalam model A-KWK
    b) Pantarlih meminta kepada kepala keluarga atau anggota keluarga yang di datangi untuk memeriksa nama – nama anggota keluarga yang terdaftar dalam model A-KWK dan Validitas informasi di dalamnya
    c) Jika terdapat informasi data pemilih yang dianggap tidak akurat, salah atau tidak lengkap maka Pantarlih memperbaiki atau melengkapi data tersebut berdasarkan KK atau KTP Pemilih
    d) Pantarlih memastikan kembali apakah masih terdapat anggota keluarga yang belum terdaftar, jika terdapat anggota keluarga yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih, Pantarlih mencatat dalam model A.A-KWK berdasarkan kartu keluarga atau KTP Pemilih
    e) Pantarlih menanyakan kepada keluarga tersebut apakah terdapat keluarga yang menyandang disabilitas
    f) Pantarlih menanyakan apakah ada anggota keluarga yang terdaftar dalam model A-KWK tidak lagi memenuhi syarat sebagai pemilih karena telah meninggal dunia, pindah domisili

atau anggota TNI/POLRI

g) Jika terdapat pemilih yang tidak memenuhi syarat sebagai pemilih, Pantarlih mencoret kolom pemilih tersebut dan mencatat alasan pencoretan pada kolom keterangan

h) Pantarlih mendaftarkan anggota keluarga yang akan berumur 17 tahun pada hari pemungutan suara dan anggota keluarga yang belum cukup umur tapi sudah atau pernah menikah yang belum terdaftar ke dalam model A.A-KWK

3) Setelah selesai mendata seluruh anggota keluarga dalam satu rumah Pantarlih melakukan:

a) Mengisi formulir tanda bukti telah didaftar (model A.A.1-KWK)

b) Menyerahkan tanda bukti telah difaftar (Model A.A.1-KWK) tersebut yang telah ditanda tangani oleh PPDP dan kepala keluarga atau perwakilannya dan disimpan sebagai bukti asli

c) Isi stiker bukti telah terdaftar (Model A.A.2-KPU) dan tempelkan di tempat yang mudah terlihat (pintu, jendela, dinding bagian depan rumah dsb)

4) Pantarlih memastikan bahwa pemilih yang terdaftar adalah benar – benar warga daerah pemilihan tersebut dengn dibuktikan adanya kepemilikan KTP, Kartu Keluarga atau surat keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

5) Pantarlih tidak boleh mendaftarkan pemilih yang berasal dari

daerah lain (perantauan) yang telah tinggal/menetap diwilayah kerja Pantarlih tetapi belum/tidak memiliki KTP daerah yang melaksanakan pemilihan.

6) Setelah semua warga dilakukan pencocokan dan penelitian, Pantarlih dapat meminta persetujuan dari ketua RT/RW setempat.
7) Pantarlih menyerahkan hasil coklit kepada PPS secepatnya setelah coklit selesai dilaksanakan dan meminta Berita acara serah terima yang ditanda tangani oleh Pantarlih dan PPS.

Setelah proses coklit selesai sanjutnya dilakukan penyusunan Daftar Pemilih hasil pemutakhiran dengan tahapan sebagai berikut :

1. PPS mengumpulkan dan mengkoordinasikan hasil verifikasi data pemilih oleh Pantarlih setelah coklit selesai
2. Setelah PPS memastikan semua hasil coklit telah lengkap diterima, PPS segera menyusun daftar pemilih hasil pemutakhiran
3. Memeriksa hasil cooklit Pantarlih dan meminta penjelasan jika terdapat sesuatu yang tidak lengkap atau tidak dimengerti oleh PPS
4. PPS wajib menyusun daftar hasil pemutakhiran dalam Formulir Model A.B-KWK dalam format soft file
5. Data Pemilih yang dimasukkan dalam formulir model A.B-KWK adalah hanya data perubahan hasil coklit oleh Pantarlih
6. Penyusunan Daftar Pemilih hasil Pemutakhiran pada formulir Model A.B-KWK berdasarkan Model A-KWK yang telah dimutakhirkan dan model A.A-KWK dari Pantarlih

7. Dalam menyusun model A.B-KWK, PPS menggunakan Microsoft EXCEL dengan ketentuan sebagai berikut :
    a) Satu Excel sheet untuk satu TPS, satu PPS dalam satu file dokumen excel
    b) Jika PPS memiliki 15 TPS maka akan terdapat 15 Excel sheet dalam satu file excel

Sebelum ditetapkannya Daftar Pemilih Sementara, PPS melakukan Pleno rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran, Pleno rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran dilaksanakan oleh PPS paling lambat 3 hari setelah penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran selesai dilaksanakan, dalam Pleno PPS mengundang Pengawas Pemilihan Lapangan (PPL), Tim Kampanye pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dan Pemantau Pemilihan atau tokoh masyarakat dalam rapat pleno rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran. PPS juga memperbaiki Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran jika terdapat usulan perbaikan dari PPL atau tim kampanye pasangan calon yang disertai dengan bukti yang kuat dan harus disertai dengan akta autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, Tanggal lahir Pemilih dan Lokasi TPS. Ketua dan anggota PPS menandatangani dan membubuhkan stempel basah berita acara rapat pleno rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran. Panitia Pemungutan Suara memberikan berita acara (BA) rapat pleno dan rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran kepada Panitia Pemilih

Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Aceh Kabupaten/Kota, Panitia Pemilu Lapangan dan/atau tim kampanye pasangan calon. Data yang telah dilakukan validasi kemudian menjadi Daftar Pemilih Sementara yang disahkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya dalam rapat Pleno Penetapan Daftar Pemilih Sementara dan di unggah kedalam portal sidalih (sistem data pemilih) menurut Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 tahun 2018 tentang daftar pemilih, sidalih (sistem data pemilih) adalah seperangkat sistem dan teknologi informasi untuk mendukung kerja penyelenggara pemilu atau pemilihan dalam menyusun, mengkoordinasi, mengumumkan dan memelihara data pemilih.

Tahap selanjutnya adalah pengumuman dan perbaikan Daftar Pemilih Sementara yang dilakukan oleh Panitia Pemungutan Suara, tahap pengumuman dan perbaikan Daftar Pemilih Sementara antar lain:

1. Setelah menerima Daftar Pemilih Sementara dari Komisi Pemilhan Umum/Komisi Independen Pemilihan Aceh Kabupaten/Kota, Panitia Pemungutan Suara mengumumkan Daftar Pemilih Sementara di tempat yang mudah dijangkau masyarakat selama 10 hari
2. Selama pengumuman Daftar Pemilih Sementara , Pengawas Pemilu Lapangan, tim kampanye dan masyarakat memiliki kesempatan untuk memberikan masukan dan tanggapan terhadap DPS
3. Tanggapan dan masukan terhadap Daftar Pemilih Sementara harus

tertulis dan dituangkan ke dalam formulir A.1A-KWK

4. Pemilih yang akan memberikan tanggapan dan masukan diwajibkan untuk memperlihatkan identitas kependudukannya atau surat keterangan sah lainnya
5. Pemilih dapat datang sendiri atau diwakili atau mewakili pemilih lainnya ketika memberikan tanggapan dan masukkan terhadap Daftar Pemilih Sementara
6. Panitia Pemungutan Suara melakukan pengecekan terhadap kebenaran tanggapan dan masukan dari Pengawas Pemilu Lapangan, tim kampanye, dan/atau masyarakat.
7. Panitia Pemungutan Suara mencatat tanggapan masyarakat yang telah diperiksa kebenarannya di dalam formulir model A.2-KWK dan memberikan bukti telah diterimanya usulan perbaaikan atau telah mendaftar
8. PPS menyalin formulir Model A.2-KWK ke dalam *softcopy* format Microsoft Excel, dengan mengikuti langkah – langkah pada penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran :
    a) Menginput pemilih yang Tidak Masuk Syarat (TMS) terlebih dahulu dan memberikan kode saring pada kolom keterangan
    b) Menginput pemilih yang mengalami perbaikan (ubah) data pemilih
    c) Menginput pemilih yang belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Sementara

9. PPS menyelesaikan kegiatan nomor 8 di atas paling lambat adalah 5 hari

Daftar pemilih yang telah diperbaiki kemudian di tetapkan menjadi Daftar Pemilih Tetap Oleh Komisi Kabupaten Tasikmalaya dalam rapat pleno penetapan Daftar Pemilih Tetap Berikut ini adalah Daftar Pemilih Tetap yang terdaftar di TPS 2 Neglasari yang ada di wilayah Dusun Naga untuk Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden Tahun 2019.

Tabel 3

Daftar Pemilih Tetap TPS 2 Desa Neglasari

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-Laki	264
2	Perempuan	274
Jumlah		**538**

Sumber : KPUD Kab. Tasikmalaya

Dari jumlah DPT tersebut terdapat penambahan jumlah pemilih terdaftar pemilih dari Rukun Tetangga lainnya yang ada di wilayah Dusun Naga Desa Negalasari, hal ini terjadi di TPS 2 jumlah pemilih yang terdaftar di TPS hanya sekitar 150-200 orang sehingga dalam pelaksanaa pemilihan umum senantiasa digabung dengan RT lainnya yang ada di Dusun Naga Desa Neglasari. Hal ini ditegaskan dari hasil wawancara dengan key informan Bapak Ma'aun selaku Punduh Desa sebagai berikut :

"Warga Kampung Naga bersama penduduk lain di sekitarnya memilih di TPS 2 Desa Neglasari, dengan jumlah DPT (Daftar Pemilih

Tetap) di TPS 2 untuk Pemilu 2019 sebanyak 198 orang. Pengalaman tingkat partisipasi pemilih di TPS 2 itu sebesar 80 persen. Selain itu sejal sudah lama, masyarakat adat Kampung Naga dikenal sebagai masyarakat yang antusias memberikan hak suaranya pada setiap pemilihan bupati, gubernur, anggota legislatif, maupun pemilihan presiden. Warga yang memiliki hak pilih, selalu semangat datang ke TPS untuk memberikan hak suaranya pada setiap momentum pemilihan, kecuali mereka yang berhalangan seperti sakit". (Hasil wawancara, 10 Februari 2020)

Selanjutnya Informan Bapak Adang Dorodjatun selaku petugas KPPS Desa Neglasari memberikan pernyataannya sebagai berikut:

"Sebenarnya jumlah penduduk kampung naga secara keseluruhan itu ada 294 orang dengan 106 kepala keluarga, dari jumlah tersebut tentunya terdiri dari berbagai macam usia dari yang masih muda sampai yang sudah memasuki usia uzur, untuk jumlah DPT sendiri dari 198 orang itu berdasarkan verifikasi yang kita terima dari KPU Kabupaten Tasikmalaya untuk pileg dan pilpres 2019 yang lalu hak pilih dari masyarakat adat yang ada di kampung naga itu sekitar 150-200 warga dari total jumlah penduduk 294 orang, hal ini tidak berbeda jauh dengan pilkada dan pilgub yang lalu, jadi ya dikarenakan jumlah pemilih aslinya kurang dari 300 orang, makanya setiap ada pesta demokrasi seperti pilkada maupun pemilu kayak gini ya senantiasa dicampur dengan masyarakat sekitar seperti dari RT. 02 maupun dari RT. 03,

karena di kampung naga sendiri Cuma ada 1 Rukun tetangga dan hal ini telah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan KPU". (Hasil wawancara, 13 Maret 2020)

Hal ini kemudian dipertegas oleh Informan Ibu Tati Susilawati selaku petugas KPPS Desa Neglasari yang memberikan pernyataannya sebagai berikut:

"Daftar Pemilih pada tahun 2019 lalu disusun berbasis TPS. Untuk Penyusunan Daftar Pemilih dilakukan dengan membagi Pemilih untuk setiap TPS paling banyak 300 (tiga ratus) orang, dengan memperhatikan: Tidak menggabungkan kelurahan/desa atau sebutan lain; Kemudahan Pemilih ke TPS; Tidak memisahkan Pemilih dalam satu keluarga pada TPS yang berbeda; hal-hal berkenaan dengan aspek geografis; dan jarak dan waktu tempuh menuju TPS dengan memperhatikan tenggang waktu pemungutan suara". (Hasil wawancara, 13 Maret 2020)

Dari pemaparan dan hasil wawancara dengan tiga informan di atas maka dapat disimpulkan bahwa tahapan pertama dari kegiatan Pemilu dan Pilpres 2019 yang lalu telah dilaksanakan dengan cukup baik di wilayah Kampung Naga, ketika kita bicara pemilu, salah satu element penting adalah data pemilih. Data pemilih juga menjadi salah satu tolak ukur kualitas pemilu, karena hanya dengan data pemilih yang berkualitas akan menghasilkan pemilu yang berkualitas pula. Daftar pemilih berkualitas memenuhi unsur komperhensif, akurat dan

mutakhir. Dalam upaya menyajikan data pemilih yang berkualitas, maka pemutakhiran data pemilih yang berkelanjutan menjadi sesuatu yang krusial. Selain menjadi kompenen penting dalam setiap pemilu, data pemilih juga menjadi data dasar proses pilkada lainnya seperti menjadi acuan utama dalam penyedian dan distribusi logistik pilkada.

Dengan adanya daftar pemilih berkualitas akan mampu meningkatkan kualitas demokrasi dengan membuka ruang seluas-luasnya kepada warga negara yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih sesuai undang-undang untuk menggunakan hak pilihnya. Dari beberapa pengalaman pemilu, akurasi data pemilih yang tertuang dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) belum mampu mengakomodasi seluruh pemilih sehingga diperlukan pengawasan yang ketat dalam proses pemutakhiran data pemilih yang berkelanjutan.

Daftar pemilih merupakan salah satu tahapan pemilihan yang sangat krusial dan sangat strategis bagi terselenggaraannya Pemilihan baik itu Pemilihan Umum maupun Pilkada. Bawaslu Kabupaten Tasikmalaya sebagai Penyelenggara Pengawas Pemilihan, berkomitmen untuk kerja sama melakukan sinergi dengan KPU Kabupaten Tasikmalaya, Dinas Kependududkan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya dan para stakeholder serta melaksanakan kegiatan dalam bentuk sosialisasi kepada masyarakat Tasikmalaya sehingga tercapai daftar pemilih yang komprehensif.

Di Kampung Naga sendiri karena wilayahnya hanya 1,5 hektare dalam satu rukun tetangga yang dihuni oleh 294 jiwa yang berada di Dusun Naga, salah satu dari empat dusun di Desa Neglasari, yakni Dusun Naga (lima RT dan dua RW yakni RW 01 dan RW 02), Dusun Tanjak Nangsi (sembilan RT dan tiga RW yakni RW 03, 04, dan O5), Dusun Cikeusik (empat RT dan dua RW yakni RW 06 dan 07), dan Dusun Sukaratu (lima RT dan dua RW yakni RW 08 dan 09), proses pendataan daftar pemilih tetap telah dilaksanakan dengan baik oleh para petugas pantarlih dimana di wilayah kampung naga terdiri dari 1 TPS yaitu TPS 2 dengan jumlah pemilih yang terdaftar di TPS itu sebanyak 538 orang, pada masa kampanye menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 17 April 2019 secara serentak yang memilih Presiden/Wapres, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota masyarakat di kampung naga sangat antusias dalam menyambutnya, dimana hal ini tentunya membawa angin segar bagi proses demokrasi di Negara Indonesia, kepastian memberikan suara dalam pemilu itu merupakan salah satu bentuk dari pengabdian kepada negara. Menurut sejarahnya juga Kampung Naga sempat dibakar habis dan dihilangkan catatan-catan sejarahnya pada media tahun 1950-an, tatkala para pemberontak dari pasukan DI/TII Kartosuwiryo, turut menguasai kawasan itu tetapi penduduknya tetap setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dipimpin oleh Presiden Soekarno

Artinya warga patuh dan taat memberikan hak pilihnya dalam setiap pemilu.

b. Kampanye Politik

Kampanye politik merupakan suatu ajang manuver politik untuk menarik sebanyak mungkin pemilih dalam pemilihan umum sehingga dapat meraih banyak suara dan kekuasaan. Untuk itu segala cara mungkin akan dipakai dari mulai pemberian janji-janji dari calon anggota legislative maupun tim sukses sampai intimidasi dengan harapan bisa duduk dan berkuasa. Dari pandangan tersebut, kampanye politik merupakan bagian marketing politik yang dirasa penting oleh partai politik menjelang pemilu legislative tahun 2019.

Namun meskipun begitu, dari hasil penelitian yang dilaksanakan peneliti, pada pemilu tahun 2019 khususnya pada masyarakat adat Kampung Naga, suasana pemilu 2019 sama sekali tidak terlihat di Kampung Naga. Hal ini dapat dilihat dari tidakadanya alat peraga kampanye (APK) seperti baliho, poster, atau foto-foto calon anggota legislatif maupun calon presiden dan wakilnya. Padahal di tempat lain yang masih berada di Desa Neglasari marak terpasang atribut dan alat peraga kampanye itu.

Salah satu narasumber di Kampung Naga menceritakan bahwa selama masa kampanye pemilu 2019 kemarin tidak ada calon anggota legislatif, orang partai, atau tim sukses pendukung calon presiden dan wakil presiden yang datang ke Kampung Naga.

"Selama ini tidak pernah ada, karena warga memiliki prinsip jika ingin kampanye harus bersamaan, tidak boleh terpisah dan masing-masing," (Hasil wawancara, 10 Februari 2020)

Begitu juga yang dikemukakan oleh Bapak Dedi Hidayat selaku masyarakat Asli Kampung Naga yang menyatakan bahwa :

“Sudah sejak lama ya, karena kan kampung kita memegang teguh budaya adat sejak dari dahulu, jadi kalau masalah pemilu maupun pilkada lainnya, kita hanya memberikan hak pilih kita saja di balik bilik suara, kalau kampanye tidak pernah ada, karena hal itu melanggar adat yang kita yakini” (Hasil wawancara, 10 Februari 2020)

Bapak Syaiful Zamzam selaku masyarakat Asli Kampung Naga juga menyatakan bahwa :

“Saya tidak pernah mengikuti kegiatan seperti kampanye atau orasi-orasi gitu lah, karena itu bertentangan dengan keperceyaan kami yang sudah turun temurun dituturkan oleh ketua kampung” (Hasil wawancara, 10 Februari 2020)

Manda dan Diki Riswandi juga menegaskan bahwa :

“kalau yang namanya kegiatan kampanye di kampung naga ini memang sepi sejak dari dulu gak pernah ada kegiatan yang berbau kampanye, membuat atau menempel baligo gambar calon atau suatu partai juga kan tidak boleh” (Hasil wawancara, 10 Februari 2020)

“itu kan sudah aturan yang tertulis dan tersirat dari jaman nenek moyang kami. Jadi kami harus taat untuk menjaga dan mengamalkan aturan tersebut” (Hasil wawancara, 10 Februari 2020)

Informan lainnya, yaitu Ibu Nani juga mengatakan bahwa :

“setahu saya, kalau ada pesta kayak pemilu gitu, ya kita tinggal datang ke TPS dan menyalurkan hak pilih kita secara rahasia, jadi kalau masalah kampanye kayak gitu, ya saya enggak tahu tuh ya” (Hasil wawancara, 10 Februari 2020)

Dari pemaparan dan hasil wawancara diatas, dapat dijelaskan bahwa, penduduk Kampung Naga tidak pernah menerima kegiatan kampanye baik itu yang dilakukan oleh sang calon maupun tim suksesnya baik kampanye dalam bentuk orasi maupun dalam bentuk pemasangan poster maupun baligo, hal ini dikarenakan sudah menjadi aturan yang tersirat dari sejak dahulu kala bahwa setiap penduduk Kampung Naga wajib menjaga nilai dan etika yang menjadi ciri khas keadatan kampung mereka. Selain itu penduduk Kampung Naga memang sejak lama dikenal sangat lekat nilai-nilai kebersamaannya, hidup bersama dalam komunitas sosial yang harmonis. Bila di kampung lain banyak penduduk yang bertikai hanya karena berbeda dalam dukungan atas calon, sebaliknya hal itu sama sekali tidak terjadi di Kampung Naga. Bagi penduduk Kampung Naga wajib untuk tetap bersatu dan tak terpecah belah hanya karena berbeda pilihan.

Di sisi lain, siapapun yang terpilih, warga Kampung Naga tetap teguh mempertahankan nilai-nilai kearifan lokal yang mereka yakini dapat menyelaraskan hubungan hidup mereka dengan Sang Maha Pencipta, sesama manusia, dan alam sekitarnya.

c. Partisipasi Politik Masyarakat Adat Kampung Naga

Partisipasi politik secara harafiah berarti keikutsertaan dalam konteks politik, hal ini mengacu pada keikutsertaan warga dalam berbagai proses politik. Partisipasi politik adalah keterlibatan warga dalam segala tahapan kebijakan, mulai dari sejak pembuatan keputusan sampai dengan penilaian keputusan, termasuk juga peluang untuk ikut serta dalam pelaksanaan keputusan. Keikutsertaan warga dalam proses politik tidaklah hanya berarti warga mendukung keputusan atau kebijakan para pemimpinnya, partisipasi politik masyarakat idealnya berdasarkan kesadaran politik masyarakatnya, karena partispasi politik masyarakat akan berdampak pada kehidupan mereka.

Selama ini demokrasi dipahami sebagai bentuk pemilihan secara langsung untuk mengisi jabatan publik atau politik. Secara umum dalam pengisian jabatan anggota DPR/DPRD maupun pengisian jabatan RI 1 dan RI 2 menggunakan jalur partai politik. Sedangkan dalam pengisian jabatan kepala daerah menggunakan dua jalur, pertama adalah melalui jalur partai politik dan jalur kedua melalui calon independen atau yang biasa di sebut jalur perseorangan. Mencermati keberadaan calon independen, maka sejak keputusan Mahkamah

Konstitusi (MK) dalam *judicial review* terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang menyatakan bahwa calon independen dalam pilkada diperbolehkan menimbulkan optimisme baru dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia.

Masyarakat Adat Kampung Naga adalah masyarakat yang hidup dengan pola kesederhanaan bersikap, berpikir dan dalam kehidupan bersosial lainnya. Sehingga masyarakat Kampung Naga menjadi salah satu daerah yang eksotik dalam kajian sosial budaya. Karena dilihat dari sejarah yang berkembang di Kampung Naga menunjukan bahwa bagaimana warga Kampung Naga dengan sikap keramah tamahannya serta tanggung jawab yang ada pada setiap warga Kampung Naga telah cukup berhasil mempertahankan tradisi-tradisi yang secara turun-temurun dilestarikan dan dijalankan dengan penuh tanggung jawab.

Bentuk rumah yang khas menjadi salah satu bukti sejarah yang masih murni terjaga separti yang dicontohkan oleh nenek moyangnya. Sehingga rumah-rumah yang ada di Kampung Naga tersusun rapi dengan ketentuan-ketentuan yang mereka percaya. Seiring dengan kebudayaaan yang berkembang pada masyarakat Kampung Naga, kehidupan sosial kemasyarakatan pun mulai menunjukan kematangan warga Kampung Naga didalam memahami perkembangan jaman. Hal itu terlihat dari berbagai jenis alat elektronik yang sudah beredar dan digunakan oleh warga Kampung Naga seperti radio, televisi, meskipun

hanya memanfaatkan aliran listrik dari *accu*, bahkan tidak sediki masyarakat yang sudah menggunakan *hand pone*.

Selain itu jenjang pendidikan yang *dienyam* warga Kampung Naga sudah mulai keluar dari belenggu kebodohan dan kemiskinan, hal itu bisa kita lihat dari beberapa anak-anak Kampung Naga yang melanjutkan sekolahnya kejenjang yang lebih tingi bahkan ada beberapa yang diantaranya sampai kejenjang perguruan tinggi. Dengan demikian warga Kampung Naga sekarang sudah jauh cerdas dari apa yang terpikirkan pada masyarakat minoritas atau masyarakat adat pada umumnya. Sehingga hal itu berpengaruh terhadap perkembangan dan kemajuan perekonomian warga Kampung Naga yang terutama mayoritas penduduknya memiliki usaha bertani.

Dari uraian singkat di atas, ketika kita berbicara masalah budaya politik tentunya tidak akan terlepas dari tinjauan perilaku dan pertisipasinya terhadap fenomena-fenomena politik yang berkembang baik dalam *sekala* lokal maupun nasional. Maka demi mengetahui budaya politik yang berkembang pada masyarakat Kampung Naga, peneliti melakukan penelitian langsung kelapangan dengan menggunakan metode wawancara mendalam dan observasi langsung. Sehingga data-data yang didapat sesuai dengan apa yang terjadi di lokasi penelitian tersebut. Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada para informan bisa kita lihat pada matrik berikut ini :

Tabel 4
Matrik Pertanyaan

Bagaimana Kegiatan Pemilu Tahun 2019 Dalam Lingkungan Masyarakat Adat Kampung Naga

No	Nama Informan	Jenis kelamin	Jabatan	jawaban
1.	Bpk. Ade Suherlan (AS)	Laki-laki	Ketua adat	Proses Pemilu 2019 di kampung Naga tidak jauh berbeda dengan masyarakat pada umumnya, pada hari pemungutan suara masyarakat datang ke TPS yang telah ditetapkan sebagai tempat pemungutan suara. Tempat pemungutan suara tidak didirikan didalam kampung naga melainkan diluar wilayah adat.
2.	Bpk. Ma'un (Ma)	Laki-laki	Punduh	Sifat pemilihan sendiri sama halnya dengan masyarakat umum dan peraturan pemilihan yaitu bebas dan rahasia, jadi peran kepala adat hanya pada bagian penyelenggaraan saja, tidak mempengaruhi atau menentukan suara yang akan diberikan oleh masyarakat.
3.	Bapak Habib (H)	Laki-laki	Masyarakat	Dalam masyarakat adat, hal pemilihan umum tetap dilaksanakan karena kita selaku warga negara Indonesia wajib memilih pemimpinnya. Adapula peran *kuncen* yaitu mengarahkan dan menghimbau masyarakat supaya mengikuti pemilu.
4.	Bpk. Sobirin (S)	Laki-Laki	Masyarakat	Dalam pemilu tahun 2019 saya mengikuti proses pemilihan karena ada himbauan dari tokoh masyarakat untuk ikut berpartisipasi dan jangan golput.
5.	Amang	Laki-Laki	Masyarakat	Kegiatan pemilu waktu 2019 lalu yang saya lihat berjalan dengan baik dan aman ya,

				saya juga ikut memilih di TPS yang sudah ditentukan. Dan respon masyarakat yang saya lihat bagus dan tidak ada penolakan.
6.	Aan S	Perempuan	Masyarakat	Tentu saja saya ikut memilih karena kan itu hak kita sebagai warga Negara Indonesia untuk menyalurkan hak suaranya, dan kita tidak pernah dipaksa sama siapapun, Cuma ya ketua adat hanya menyarankan saja supaya ikut berpartisipasi dengan cara mencoblos di bilik suara.
7.	Dedi Hidayat	Laki-Laki	Masyarakat	Kegiatan pemilu disini ya gitu kita datang ke tempat pemungutan suara dan kita memilih calon sesuai dengan kehendak kita masing-masing.
8.	Syaiful Zamzam	Laki-Laki	Masyarakat	Antusias warga yang ada di kampung naga dan sekitarnya setiap acara demokrasi dan kegiatan pemilu sangat bagus, jarang sekali ada yang golput kalau saya lihat, yang tidak bisa datang paling kalau yang lagi ada keperluan di luar daerah atau juga yang lagi sakit.
9.	Diki Riswandi	Laki-Laki	Masyarakat	Kegiatan pemilu disini setiap ada pemilu maupun pilkada ya sangat bagus, masyarakat semua sangat antusias untuk menyalurkan hak pilihnya.
10.	Mang Anda	Laki-Laki	Masyarakat	Meskipun memang kampung kami dikenal oleh masyarakat luas sebagai kampung adat ataupun kampung terisolir ya, tapi kalau berbicara masalah pemilu ya kita semua antusias.
11.	Nani	Perempuan	Masyarakat	Mau wanita atau lelaki ya kalau memang sudah cukup

				umur untuk menyalurkan hak pilihnya kan semuanya juga pasti tahu dan udah sadar sendiri, kalau sudah waktunya untuk memilih ya mereka datang sendiri ke TPS.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap para informan mengenai kegiatan pemilu tahun 2019 di Kampung Naga dapat kita bahas dari apa yang mereka sampaikan kepada peneliti dapat disimpulkan bahwa masyarakatnya adat kampUng naga ikut andil dalam partisipasi politik. Karena negara Indonesia merupakan negara yang demokratis yang mana tidak boleh membeda-bedakan antara daerah manapun dan semuanya berhak untuk menyuarakan aspirasinya dari segala kalangan masyarakat yang ada di Indonesia. Untuk itu masyarakat adat kampung naga berhak untuk memperjuangkan hak jika pemimpin atau elit-elit politik menghalang-halangi eksistensi mengenai hak-hak demokrasi.

Berdasarkan hasil wawancara dan uraian diatas mengindikasikan telah terjadinya pergeseran budaya politik yang ada di kampung tersebut, dimana pada jaman dahulu masyarakat adat Kampung Naga menyerahkan aspirasinya melalui saran yang diberikan oleh pemangku adatnya yaitu kuncen. Jadi aspirasi yang diberikan oleh seluruh masyarakat adat Kampung Naga merupakan aspirasi satu komando yang berasal dari saran yang diberikan kuncen. Jika kuncen memilih calon pasangan A, maka masyarakat adat Kampung Naga akan cenderung

memilih calon pasangan A, namun untuk pemilu tahun 2019, *kuncen* hanya memberikan arahan dengan mengajak masyarakat untuk datang ke TPS dan menyalurkan aspirasi sesuai dengan kehendak hati masing-masing masyarakat, ketua adat atau kuncen tidak mengarahkan masyarakat untuk memilih partai atau pasangan calon tertentu.

Dengan demikian dapat kita tarik kesimpulan bahwa partisipasi politik dari masyarakat adat Kampung Naga merupakan wujud dari negara yang demokratis, yang mana masyarakat di beri ruang untuk menyuarakan aspirasinya lewat pemilihan umum tahun 2019 secara bebas dan rahasia. Dengan adanya kegiatan Pemilu Tahun 2019 di Kampung Naga pada akhirnya dapat di arahkan untuk mengubah keputusan-keputusan pejabat-pejabat yang sedang berkuasa, menggantikan atau mempertahankan pejabat-pejabat itu, atau mempertahankan organisasi sistem politik yang ada dan aturan-aturan permainan politiknya. Semuanya merupakan cara-cara untuk mempengaruhi keputusan-keputusan dan tindakan-tindakan pemerintah.

Selanjutnya peneliti juga menanyakan hal-hal mengenai persepsi para informan terhadap perlakuan khusus untuk pemilih yang berasal dari lingkungan Adat . Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap para informan dapat dirumuskan jawaban-jawaban mereka dalam sebuah matrik sebagai berikut :

Tabel 5 Matrik Pertanyaan
Apakah Ada Perlakuan Khusus Untuk Pemilih Yang Berasal Dari Lingkungan Adat

No	Nama Informan	Jenis klelamin	Jabatan	jawaban
1.	Bpk. Ade Suherlan (AS)	Laki-laki	Ketua adat	Tidak, dalam pemungutan suara dicampur dengan masyarakat dari luar wilayah adat karena secara administratif wilayah adat kampung naga berada di wilayah Desa Neglasari.
2.	Bpk. Ma'un (Ma)	Laki-laki	Punduh	Warga Kampung Naga bersama penduduk lain di sekitarnya memilih di TPS 2 Desa Neglasari, dengan jumlah DPT (Daftar Pemilih Tetap) di TPS 2 untuk Pemilu 2019 sebanyak 298 orang. Jadi bukan hanya warga adat kampung naga saja tapi ada juga dari kampung lainnya yang memilih di TPS tersebut
3	Adang Dorodjatun	Laki-laki	Petugas KPPS Desa Neglasari	Kalau saya lihat tidak ada ya perlakukan khusus yang diberikan, karena semua warga Negara Indonesia kan memang mempunyai hak untuk menyalurkan suaranya.
4	Tati Susilawati	Perempuan	Petugas KPPS Desa Neglasari	Tidak ada ya, paling juga kalau misalkan kita TPS buka dari jam 7 sampai jam 13.00 terus ketika memasuki waktu akhir masih ada warga yang belum menyalurkan hak pilihnya, ya kita jemput ke rumahnya gitu, karena kan sebagaimana kita tahu, mayoritas penduduk disini bekerja di sawah dan ladang jadi kadang ya suka masih di sawah gitu pas hari pencoblosan itu.
5	Encep Solihin	Laki-Laki	Petani	Ya sama aja gak ada yang dikhususkan, paling kalau ada yang telat datang ke TPS ya dijemput oleh petugas nya

6	Habib	Laki-Laki	Buruh Tani	Setiap pemilu maupun pilkada, pemilih di TPS 2 suka disatukan dengan warga yang lain di luar kampung naga, tapi ya semua saja gak ada yang dikhususkan.
7	Entin	Perempuan	IRT	Kalau saya lihat semua diperlakukan sama, gak ada yang di istimewakan.
8	Sobirin	Laki-Laki	Buruh Tani	Tidak tahu ya, setahu saya paling kalau ada yang sakit ya gak perlu datang ke TPS.
9	Amang	Laki-Laki	Pengrajin	Tidak pernah ada ya, semua sama saja, paling kalau ada yang telat ya sudak disusun oleh petugas.

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan, dapat kita lihat bahwa meskipun masyarakat adat kampung naga masih bisa dikatakan sebagai masyarakat tradisional yang menjunjung adat leluhur, tetapi dalam kegiatan pemilu 2019 yang lalu tidak ada perlakukan khusus yang diberikan kepada mereka. Ketika mereka datang ke TPS 02 sebagai tempat penyaluran aspirasi, mereka berbaur dengan warga lainnya di luar wilayah kampung naga yang juga terdaftar di TPS tersebut, untuk menjaga kesucian wilayah kampung naga dari hiruk pikuk politik yang terjadi, sejak dahulu kala warga kampung naga tidak pernah memberikan izin untuk melakukan kampanye maupun memasang baliho, poster yang berkaitan dengan kontestan pemilu baik itu berupa symbol partai, caleg maupun capres/cawapres sehingga letak TPS 02 juga berada di luar wilayah adat kampung naga.

Dari hasil wawancara dan pembahasan diatas, dapat kita simpulkan bahwa masyarakat adat kampung naga menerima pemilu 2019 dengan tangan terbuka yang ditunjukkan dari tingkat kehadiran masyarakat ke TPS 02 untuk menyalurkan suara atau aspirasinya dengan tidak “menodai” adat turun temurun yang mereka lakukan selama ini.

Selanjutnya peneliti juga menanyakan hal-hal mengenai persepsi para informan terhadap respon masyarakat adat kampung naga terhadap pemilu tahun 2019. Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap para informan dapat dirumuskan jawaban-jawaban mereka dalam sebuah matrik sebagai berikut :

Tabel 6 Matrik Pertanyaan
Bagaimana Respons Masyarakat Terhadap Pemilu Tahun 2019

No	Nama Informan	Jenis klelamin	Jabatan	jawaban
1.	Bpk. Ade Suherlan (AS)	Laki-laki	Ketua adat	Semuanya ikut Mayarakat kampung naga datang ke TPS atas himbauan kepala adat, sebagai bentuk kepatuhan masyarakat kepada negara. Masyarakat adat memiliki falsafah yaitu "*Parentah Gancang Lakonan, Panyaur Geura Temonan, Pamunut Gancang Caosan*".
2.	Ibu Entin (E)	Wanita	Masyarakat	Yang saya ketahui tentang politik yaitu dengan diadakannya pemilu yang dilaksanakan oleh seluruh warga Negara Indonesia. Semenjak dahulu kala masyarakat Kampung Naga

				pasti turut serta dalam pemilu baik pilkada, pilgub maupun pemilu.
3	Bpk. Ma'un (Ma)	Laki-laki	Punduh	Kampung Naga adalah sebuah kampung adat yang masih kental dengan kebudayaan, maka dari itu kami sangat menjaga tradisi dan adat istiadat di Kampung Naga. Meskipun demikian, kami adalah warga Negara Indonesia yang tercatat sah sebagai WNI maka kami tetap mengikuti dan menjalankan apa yang diperintahkan oleh pemerintah seperti pemilu.
4	Adang Dorodjatun	Laki-laki	Petugas KPPS Desa Neglasari	Respon masyarakat di Kampung Naga dalam setiap pesta demokrasi sangat bagus dan antusias.
5	Tati Susilawati	Perempuan	Petugas KPPS Desa Neglasari	Antusiasme warga kampung naga itu dalam setiap pemilu sangat bagus, karena selain mereka menjungng adat dan leluhur mereka, mereka juga taat terhadap aturan dari pemerintah pusat maupun daerah.
6	Encep Solihin	Laki-Laki	Petani	Ya bagus lah, bisa kita lihat kan, tingkat golput di kampung kami itu cukup rendah.
7	Habib	Laki-Laki	Buruh Tani	Respon kita bagus ya, karena kita juga sadar hidup di Negara demokrasi.
8	Sobirin	Laki-Laki	Buruh Tani	Kalau masalah pemilu ataupun pilkada, saya pasti nyempatin buat ikut nyoblos.
9	Amang	Laki-Laki	Pengrajin	Ya tentu saja respon kita bagus yak arena kita juga tau hak kita sebagai warga Negara.
10	Aan S	Perempuan	Buruh Tani	Ini kan mungkin sudah menjadi kewajiban kita selaku warga Negara yang taat pada aturan untuk tidak

				memilih atau golput, makanya warga dan termasuk saya cukup antusias.
11	Dedi Hidayat	Laki-Laki	Buruh Tani	Dari dulu juga warga kampung naga sudah tahu dan mengetahui tata cara pemilu, jadi ya setiap ada pemilu kita selalu hadir untuk menyalurkan hak kita.
12	Syaiful Zamzam	Laki-Laki	Pengrajin	Tingkat golput di kampung kami saya rasa dan saya lihat cukup rendah ya.
13	Diki Riswandi	Laki-Laki	Pencari Madu	Respon warga semua menerima dan mau ikut berperan serta dalam meramaikan pesta demokrasi dengan cara datang langsung ke tempat pemungutan suara.
14	Mang Anda	Laki-Laki	Buruh Tani	Meskipun kita disebut kampung adat oleh dunia luar, tapi kita juga sangat menghormati anjuran dan aturan dari pemerintah pusat maupun kabupaten, selain dengan dengan menjaga tradisi leluhur kami tentunya.
15	Nani	Perempuan	IRT	Respon masyarakat disini dalam menyambut pemilu ya sangat antusias sekali, jarang ada yang golput kecuali kalau warga tersebut sakit.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan beberapa informan di atas, maka dapat bahas bahwa masyarakatnya adat kampung naga menaruh respon positif dalam menyambut pemilihan umum 2019 lalu. Hal tersebut dibuktikan dengan semua pihak menyukseskan laju jalannya pemilu di kampung naga. Selain berpartisipasi dan mendukung jalannya alur pesta demokrasi tersebut, masyarakat Kampung Naga juga menjaga keamanan dan ketertiban

berjalannya kegiatan itu, dan kondisi ini dibuktikan dengan terjaganya keamanan yang baik di TPS 02 Desa Neglasari.

Maka dari paparan data yang peneliti himpun dan observasi yang peneliti lakukan, dapat diketahui, bahwa respon masyarakat, tokoh masyarakat hampir semuanya menaruh respon positif untuk sukses terlaksananya Pemilu 2019 di Kampung Naga Desa Neglasari Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya.

Tabel 7 Matrik Pertanyaan
Apa harapan Bapak/Ibu kedepannya dengan keikutsertaan masyarakat Adat Kampung Naga untuk kegiatan politik Indonesia

No	Nama Informan	Jenis klelamin	Jabatan	jawaban
1.	Bpk. Ade Suherlan (AS)	Laki-laki	Ketua adat	Untuk kami masyarakat Kampung Naga memilih Presiden adalah sebuah keharusan karena pentingnya pemimpin, namun untuk harapan kami tidak mengharapkan apapun dari pemimpin yang terpilih nanti karena pemerintah atau pemimpin bukan untuk tempat meminta melainkan untuk dilayani seperti yang nenek moyang mereka yakini yang tertuang dalam sebuah falsafah ”*Pamarentah sanes pentaeun, pamarentah sanes lawaneun tapi pamarenatah kaulaaneun*”.
2.	Ibu Entin (E)	Wanita	Masyarakat	Proses Pemilu 2019 tidak menghambat atau mengganggu pekerjaan dan setuju dengan adanya Pemilu karena adanya seorang pemimpin adalah hal yang sangat penting seperti dalam wilayah adat yang memerlukan kepala adat.
3	Bpk. Ma’un (Ma)	Laki-laki	Punduh	Masyarakat mengikuti pemilihan tapi bukan berarti ikut untuk berpolitik istilahnya “ *ngiring tapi henteu iring-iringan*” dalam artian bahwa keikutsertaan dalam Pemilu bagi mereka hanya sebagai bentuk ketaantan warga negara bukan untuk kepentingan dan memenuhi kebutuhan diri sendiri.

4	Encep Solihin	Laki-Laki	Petani	Harapan kita ya semoga dalam setiap pemilu bisa berjalan dengan baik dan tanpa ada konflik apapun, khususnya ya di kampung naga ya
5	Habib	Laki-Laki	Buruh Tani	Mau siapapun yang menang ya kita harapkan Negara kita selalu aman dan tenteram saja.
6	Sobirin	Laki-Laki	Buruh Tani	Kita sebagai warga biasa ya gak berharap apa-apa lah, karena toh kita bukan siapa-siapa, kita hanya menjalankan hak kita sebagai warga untuk menyalurkan hak suaranya gitu.
7	Amang	Laki-Laki	Pengrajin	Semoga hasil dari pemilu yang lalu bisa memberikan jalan pencerahan bagi seluruh rakyat Indonesia pada umumnya dan semoga ada pengembangan dan pemberdayaan lebih bagi kami.
8	Aan S	Perempuan	Buruh Tani	Siapapun yang menang ya kita tidak peduli karena itu kan kebaikan untuk semua tentunya, hanya ya supaya lebih memperhatikan rakyat kecil lah.
9	Dedi Hidayat	Laki-Laki	Buruh Tani	Kita senantiasa berharap yang menang dalam pemilu lalu adalah yang terbaik bagi semua.
10	Syaiful Zamzam	Laki-Laki	Pengrajin	Harapannya gak muluk sih, semoga kesadaran berbangsa dan bertanah air di kampung kami senantiasa terjaga.
11	Diki Riswandi	Laki-Laki	Pencari Madu	Kalau dengar kata orang kan, pemilu yang lalu itu katanya berlangsung panas sekali ya tapi kalau disini sih sebenarnya adem ayem, dan harapan saya juga bisa seperti itu untuk kedepannya.

11	Mang Anda	Laki-Laki	Buruh Tani	Perhatian pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk melestarikan kampung kami sudah sangat baik, dan saya harapkan seperti itu adanya setiap tahun.
13	Nani	Perempuan	IRT	Ya kita gak muluk-muluk lah toh kita kan hanya warga biasa, harapannya mungkin bisa mensejahterakan semua termasuk dalam hal harga barang pokok.

Dari penjelasan yang disampaikan oleh informan kepada peneliti dapat kita lihat persepsi warga Kampung Naga mengenai harapan kedepannya dengan keikutsertaan masyarakat Adat Kampung Naga untuk kegiatan politik Indonesia adalah sebagai persepsi yang mereka kemukakan. Masyarakat adat Kampung Naga sangat menjaga adat yang turun temurun yang diberikan oleh nenek moyangnya, dengan begitu hingga saat ini masih terjaga akan kentalnya kearifan lokal yang dimiliki. Dengan begitu tradisi budaya politik dengan patron pemangku adat hingga saat ini masih di praktikan oleh masyarakat adat Kampung Naga. Alasan mereka untuk terus mempertahankan sistem ini seragam akan jawabannya, yaitu mereka percaya dengan pemangku adatnya yaitu kaula karena dia yang mengerti betul baiknya baginya dan bagi masyarakatnya lewat saran yang diberikan oleh sang kuncen.

Namun dalam praktiknya peranan kuncen hanya sebatas memberi saran kepada masyarakat adat Kampung Naga tanpa harus memaksakan kehendaknya agar mentaati dan mengikuti saran dan pilihannya dalam penentuan memilih calon pasangan pemimpin dengan

membebaskan kepada masyarakat adat yang tidak setuju akan saran yang telah diberikan oleh kuncen. Namun masyarakat adat Kampung Naga tetap bersikeras untuk menuruti dan mentaati terhadap saran yang telah di berikan oleh kuncen.

Dalam hal ini, proses demokrasi tidak berjalan dengan semestinya. Karena masyarakat adat Kampung Naga memilih calon pasangan pemimpin menyuarakan aspirasinya tidak sesuai hati nuraninya, melainkan sesuai dengan saran yang diberikan oleh kuncen. Maka dalam praktiknya akan sangat mudah untuk berkampanye bagi calon pasangan pemimpin, mereka hanya tinggal melakukan *lobbying* kepada pemangku adat (kuncen) Kampung Naga yang nantinya semua masyarakat adat Kampung Naga otomatis akan memilih calon pasangan tersebut. Namun kembali lagi kepada individu sang pemangku adat itu sendiri, apakah ia memberi saran kepada masyarakat adat Kampung Naga sesuai dengan kenyataanya (objektif), atau dia memberi saran untuk memilih calon pemimpin secara subyektif.

Perilaku politik merupakan produk sosial sehingga untuk memahaminya diperlukan dukungan konsep dari beberapa disiplin ilmu. Di dalam memahami perilaku politik tidak hanya menggunakan konsep politik saja, tetapi juga didukung konsep ilmu-ilmu sosial lainnya. Hal itu menunjukan bahwa ilmu politik tidak merupakan disiplin ilmu yang berdiri sendiri tetapi memiliki hubungan erat dengan disiplin ilmu yang lainnya.

Untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku politik masyarakat, pertama-tama perlu dipahami dalam konteks latar belakang historis. Sikap dan perilaku politik masyarakat dipengaruhi oleh proses-proses dan peristiwa historis pada masa lalu dan sekaligus merupakan kesinambungan yang dinamis. Hal itu disebabkan bahwa budaya politik tidak merupakan kenyataan yang statis dan tidak berkembang, tetapi justru sebaliknya merupakan sesuatu yang berubah dan barkembang sepanjang masa.

Faktor yang memberikan pengaruh dalam perilaku politik masyarakat selanjutnya adalah kondisi geografis. Faktor geo-politik memiliki implikasi dalam perilaku politik masyarakat sekaligus mempengaruhinya. Indonesia yang merupakan wilayah dengan letak geografisnya yang potensial dapat merupakan pertimbangan strategis bagi dunia internasional untuk mengadakan kerja sama dan hubungan dalam berbagai kepentingan. Di pihak lain faktor kemajemukan dan etnis merupakan hal yang rawan bagi terciptanya desintegrasi. Oleh karena itulah kondisi geografis merupakan pertimbangan yang penting dan mempengaruhi perilaku politik seperti pembuatan peraturan, dan sebagainya.

Faktor lain yang memiliki pengaruh dalam perilaku politik masyarakat adalah budaya politik. Budaya politik suatu bangsa merupakan distribusi pola-pola orientasi khusus menuju tujuan politik di antara masyarakat bangsa itu. Berfungsingnya budaya politik itu pada

prinsipnya ditentukan oleh tingkat keserasian antara kebudayaan bangsa itu dan struktur politiknya.

Perilaku politik masyarakat selain dipengaruhi oleh faktor-faktor tersebut, juga dipengaruhi oleh agama dan keyakinan. Agama telah memberikan nilai-nilai etika dan moral politik yang memberikan pengaruh bagi masyarakat dalam perilaku politiknya. Keyakinan dan agama apapun merupakan pedoman dan acuan yang penuh dengan norma-norma dan kaidah-kaidah yang dapat mendorong dan mengarahkan perilaku politik sesuai dengan agama dan keyakinannya.

d. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Masyarakat Adat Kampung Naga dalam Pemilu Tahun 2019

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada sub di atas bahwa dalam partisipasi politik ini terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi di antaranya adalah besarnya pengaruh ketua adat yang ada di kampung naga tersebut dalam mempengaruhi perilaku masyarakat dalam memilih di Pemilu 2019 yang lalu. Setelah melakukan observasi serta wawancara dengan ragam kalangan masyarakat, peneliti menganggap di tahun 2019 ini, masyarakat semakin terdidik dan pintar dalam menilai peta politik yang dimainkan setiap pemilu meskipun mereka adalah masyarakat desa adat.

Peneliti tidak sedang mencoba meninggikan dan membanggakan kondisi masyarakat desa kampung naga sendiri, tapi menurut peneliti, masyarakat Kampung Naga telah cerdas dalam

menyikapi, menilai sehingga memilih untuk berpartisipasi dalam Pemilu tahun 2019 tersebut. Hal ini dapat dibuktikan dengan data dan hasil wawancara yang telah penulis lakukan, persentasenya dapat dilihat lebih kurang dalam tabel berikut ini :

Tabel 8

Rekapitulasi Pelaksanaan Pemilu Tahun 2019 di TPS 2 Kampung Naga

Jumlah DPT	Suara Sah	Suara Rusak	Golput	Keterangan
538 orang	503 orang	15 orang	20	Golput Karena Sakit dan Faktor Usia (Lansia)

Sumber : KPPS Desa Neglasari

Dari data di atas, dapat dilihat bahwa sosialisasi dan pendidikan politik yang dberikan oleh lembaga sosial atau pihak terkait lainnya dalam meningkatkan partisiapsi politik ternyata tidak lantas mampu mendorong masyarakat untuk berpartispasi politik secara maksimal. Sehingga dalam hal ini peneliti melihat dari sisi lain mengenai pengaruh rasionalitas pemilih dalam partisipasi politik. Terlepas dari pemahaman manusia sebagai makhluk sosial, pada dasarnya manusia merupakan makhluk individu. Makhluk invidiu memiliki tingkat rasionalitas yang sangat tinggi. Sifat dasar dari makhluk rasional adalah kalkulasi untung rugi yang menjadi dasar setiap tindakanya. Hampir semua manusia akan berusaha mendapatkan barang yang dia ingikan dengan ongkos seminimal mungkin. (Sudjiono Sastroadmojo, 2015)

Barang dalam hal ini memiliki pengertian yang sangat luas. Tidak hanya barang yang berwujud namun juga barang yang tidak berwujud seperti misalnya sebuah kebijakan atau perjanjian. Sedangkan ongkos dalam hal ini tidak selalu berhubungan dengan uang, namun juga termasuk waktu dan tenaga.

Hubungannya dengan Pemilu, rasionalitas masyarakat muncul ketika mereka berfikir keuntungan apa yang akan mereka dapatkan ketika mereka menggunakan hak pilihnya. Padahal disisi lain mereka sudah jelas mengeluarkan ongkos dalam Pemilu. Ongkos dalam hal ini sudah pasti tenaga dan waktu, bahkan bisa jadi uang. Misalnya untuk transportasi menuju TPS. Masyarakat mulai berfikir apakah barang yang mereka dapatkan nantinya sebanding dengan ongkos yang mereka keluarkan. Hasil Pemilu merupakan sebuah barang ketika hasil tersebut telah berubah menjadi sebuah keputusan yang telah ditetapkan oleh KPU. Namun dalam hal ini apakah barang hasil Pemilu tersebut telah memberikan banyak keuntungan bagi masyarakat.

Bagi masyarakat keuntungan hanya didapat oleh calon yang terpilih, sedangkan dampak langsung bagi mereka tidak mereka dapatkan. Dalam Pemilu 2019 di Kampung Naga menunjukkan fakta adanya peningkatan partisipasi politik. Peningkatan tersebut namun tidak lantas menjadi kabar bahagia bagi pemerintah khususnya atas upaya-upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan partisipasi politik. Karena pada kenyataanya saat ini sangat marak berkembang

fenomena politik uang atau lebih dikenal dengan istilah *money politic* dalam Pemilu maupun pemilihan-pemilihan lainnya.

Praktik *money politic* dalam Pemilu dapat dilihat dari pandangan teori pilihan rasional. Salah satu tokoh teori pilihan rasional yang terkenal adalah James S. Coleman. Coleman mengangap bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh seseorang dipengaruhi oleh tujuan dan nilai yang diinginkan oleh mereka. (James S. Coleman, 2007)

Selanjutnya menurut Coleman dalam teori pilihan rasional ada dua unsur yang terlibat yakni aktor dan sumber daya. Uang menjadi salah satu motivasi bagi seseroang untuk berpartisiapsi dalam politik. Dalam pilkada sendiri yang dinamakan aktor adalah masyarakat dan para calon kepala daerah. Sedangkan sumber daya yang dimaksud adalah uang dan jabatan politik. Coleman menjelaskan adanya interaksi antara aktor dan sumber daya. Masing-masing aktor dapat mengendalikan sumber daya. Baik masyarakat maupun calon dapat mengendalikan jabatan politik. Masyarakat memiliki hak untuk menentukan siapa calon yang akan terpilih. Sedangkan calon juga memiliki kemampuan untuk memengaruhi pilihan masyarakat. Disinilah kemudian kedua aktor tersebut saling memengaruhi dan membutuhkan untuk mecapai tujuan masing-masing. (James S. Coleman, 2007)

Masyarakat dan para calon kepala daerah sama-sama memiliki kepentingan terhadap sumber daya yakni uang dan jabatan politik

keduanya sehingga dapat saling memengaruhi. Calon memberikan penawaran yang memberikan keuntungan kepada masyarakat. Disisi lain masyarakat memberikan penawaran berupa dukungan suara untuk memenangkan pasangan calon. Masyarakat dan calon akhirnya terlibat sebuah hubungan untuk memenuhi kepentingannya masing-masing. Sehingga praktik politik uangpun tidak dapat terhindarkan. Hak pilih menjadi sesuatu yang bisa ditukar dengan rupiah. Dengan adanya transaksi tersebut maka kedua aktor ini akan sama- sama mendapatkan sumber daya yang mereka inginkan. Dimana pemilih dalam hal ini akan mendapatkan uang sedangkan calon akan mendapatkan jabatan politik yakni berupa kemenangan dalam pemilu.

Hasil pengamatan peneliti, yang sebelumnya berawal dari sebuah sikap kekhawatiran akan terjadinya praktik *money politic* terbantahkan setelah terjun langsung di lapangan dalam mewawancarai masyarakat atau tokoh adat terkait lainnya. Partisipasi masyarakat Kampung Naga dalam Pemilu 2019 lalu bukan dilandasi oleh iming-iming *money politic*, akan tetapi lebih kepada kesadaran bersama yang berhasil dibangun oleh masyarakat itu sendiri. (Hasil Observasi, Tangga 10-14 Februari 2020)

Hal ini juga sebagaimana yang disampaikan oleh informan yang merupakan Ketua Adat Kampung Naga Yaitu Bapak Ade Suherlan : “Setau saya tidak ada praktik money politic di Kampung Naga, jikapun ada mungkin secara tertutup tanpa diketahui oleh publik. Tapi saya rasa

itu tidak mungkin, mengingat saya telah menjadi tetua adat sudah sangat lama di sini, kali ini masyarakat semakin cerdas dan semakin paham, mereka telah mampu menilai sendiri mana pemimpin yang layak dan patut untuk dipilih, sebab bicara memilih pemimpin ini bukan hanya soalan bicara isi perut hari ini atau esok lusa, tapi bicara masa depan bertahun-tahun akan datang yang akan dinikmati oleh anak cucu". (Hasil wawancara, Tanggal 10 Februari 2020)

Pernyataan ini juga diperkuat oleh pengakuan masyarakat lainnya, misal seperti pengakuan seorang ibu Rumah Tangga yang bernama ibu Entin : "Tidak ada tokoh partai atau timses calon yang datang ke desa kami untuk membagi-bagikan uang atau barang lainnya, yang ada hanya ajakan dan seruan untuk mengikuti kampanye di lapangan atau tempat-tempat kampanye, biasanya ini dilaksanakan di kecamatan, sehingga semua masyarakat dari berbagai desa ikut ke sana". (Hasil wawancara, Tanggal 10 Februari 2020)

Keikut sertaan dari masyarakat untuk menjadi timses juga menjadi sebuah faktor yang akurat dalam kegiatan pasrtisipasi masyarakat. karena dalam hal ini, masyarakat bukan hanya menjadi penonton dan pemilih saja, tapi juga menjadi aktor di dalamnya. Walaupun masyarakat yang menjadi timses ini menyerukan untuk memilih kandidat yang diusung partainya, namun bukan hanya menjadi sebuah perlombaan di sana, tapi secara langsung telah menjadi media berjalan yang mensosialisasikan kepada masyarakat untuk memilih.

Dan dalam hal ini peneliti mendapati, bahwa di Kampung Naga ternyata suaranya penuh dan tidak terpecah kepada calon calon yang lain, tapi masyarakatnya memilih satu calon secara serempak. Dan hal ini bukan dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Terkait hal ini terbukti dengan adanya penegasan dari salah seorang warga menurut Bapak Ma'un selaku Kepala Punduh Desa di Kampung Naga tidak ada paksaan dalam memilih siapapun, namun karena masyarakat sudah dapat menilai sendiri, maka yang terpilih dan merupakan suara mutlak untuk satu calon tersebut adalah kesadaran masyarakatnya yang telah melihat dan menilai bahwa si calon memang layak untuk dipilih. "Tidak ada pemberian uang dan barang yang saya lihat dalam pilkada kali ini, dulu jikapun ada tertutup, tapi di daerah kami tidak ada, saya dan keluarga serta teman-teman tidak pernah menerimanya." (Hasil wawancara, Tanggal 10 Februari 2020)

Dari beberapa pernyataan warga dan hasil amatan peneliti, maka peneliti berkesimpulan bahwa, di tahun 2019 ini, meskipun mungkin ada partisipasi politik warga yang dilatar belakangi oleh pengaruh pemberian uang atau barang dan semacamnya, namun di Kampung Naga Desa Neglasari Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya bersih dari praktek *money politic* tersebut. Dan faktor-faktor yang sangat mempengaruhi warga masyarakat dalam berpartisipasi adalah pengaruh kesadaran, sosialisasi yang baik serta tingkat kecerdasan warga yang telah pandai dalam menilai dan

menyikapi peta politik yang terjadi di tahun 2019 serta adanya peran yang sangat besar dari ketua adat kampung tersebut terkait untuk ikut mensukseskan pemilihan umum tahun 2019.

B. Pembahasan

1. Partisipasi Politik Masyarakat Adat Kampung Naga Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

Partisipasi Politik ialah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik seperti memilih pemimpin Negara, yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah *(public policy)* (Miriam Budiardjo, 2012). Dengan definisi ini, berbagai kegiatan dalam bentuk apapun dan ada beberapa individu didalamnya yang melakukan secara sadar itu merupakan partisipasi. Partisipasi politik amat urgen dalam konteks dinamika perpolitikan dalam suatu masyarakat. Melalui partisipasi poitik yang dilakukan baik oleh setiap individu maupun oleh setiap kelompok masyarakat, maka segala yang menyangkut kebutuhan warga masyarakat secara universal akan dapat di wujudkan. Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pemimpin negara dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (public policy)..

Saat ini demokrasi dipahami sebagai bentuk pemilihan secara langsung untuk mengisi suatu jabatan publik atau suatu jabatan politik. Secara umum dalam pengisian jabatan kepala daerah menggunakan dua jalur, pertama adalah

melalui jalur partai politik dan jalur kedua melalui calon independen atau yang biasa di sebut jalur perseorangan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap para informan mengenai kegiatan pemilu tahun 2019 di Kampung Naga dapat kita bahas dari apa yang mereka sampaikan kepada peneliti dapat disimpulkan bahwa masyarakatnya adat kampung naga ikut andil dalam partisipasi politik. Selain itu dari hasil wawancara dapat disimpulkan pada sistem sosial yang ada di Kampung Naga telah terjadi sistem pergeseran budaya politik yang ada di kampung tersebut, hal ini dapat dilihat pada jaman dahulu masyarakat adat Kampung Naga menyerahkan aspirasinya melalui saran yang diberikan oleh pemangku adatnya atau kuncen. Jika kuncen memilih calon pasangan A, maka masyarakat adat Kampung Naga akan cenderung memilih calon pasangan A, namun untuk pemilu tahun 2019, *kuncen* hanya memberikan arahan dengan mengajak masyarakat untuk datang ke TPS dan menyalurkan aspirasi sesuai dengan kehendak hati masing-masing masyarakat, ketua adat atau kuncen tidak mengarahkan masyarakat untuk memilih partai atau pasangan calon tertentu.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa partisipasi politik dari masyarakat adat Kampung Naga merupakan wujud dari sistem demokrasi di Indonesia, yang mana masyarakat di beri ruang untuk menyuarakan aspirasinya lewat pemilihan umum tahun 2019 secara bebas dan rahasia. Dengan adanya kegiatan Pemilu Tahun 2019 di Kampung Naga pada akhirnya dapat di arahkan untuk mengubah keputusan-keputusan pejabat-pejabat yang sedang berkuasa, menggantikan atau mempertahankan pejabat-pejabat itu, atau mempertahankan

organisasi sistem politik yang ada dan aturan-aturan permainan politiknya. Semuanya merupakan cara-cara untuk mempengaruhi keputusan-keputusan dan tindakan-tindakan pemerintah.

2. Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Masyarakat Adat Kampung Naga Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dalam sistem demokrasi, partisipasi politik masyarakat merupakan sebuah elemen yang penting. Bahkan dia dipercaya sebagai pondasi praktek demokrasi perwakilan. Karena dalam demokrasi perwakilan pemilu merupakan ajang kontestasi dalam memilih wakil rakyat yang sepatutnya dilaksanakan dengan jujur, adil dan demokratis. Pemilu merupakan sebuah *tools* (alat) untuk mengisi posisi dan jabatan publik melalui proses pemilihan oleh sekelompok orang (pemilih) yang bertujuan untuk memberikan legitimasi pada sebuah regime dalam politik modern yang diarahkan untuk mendukung berjalannya pemerintahan presidensiil dan pemerintahan daerah yang efektif. Terkait dengan ini peran masyarakat menjadi penting. Karena seperti yang dikatakan oleh Mirriam Budiardjo (2012) bahwa partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik yaitu dengan jalan memilih pimpinan negara secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi kebijakan pemerintah. Kegiatan ini tersebut mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum. Ironisnya hingga saat ini masih banyaknya permasalahan yang terkait dengan partisipasi politik masyarakat terkait dengan pemilu. Berikut ini akan dipaparkan beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi politik masyarakat adat kampung naga dalam pemilu tahun 2019 yang lalu, sesuai data yag

diperoleh dilapangan saat penelitian dilakukan. Faktor-faktor dimaksud, diantaranya :

a) Terbentuknya Antusiasme

Momentum politik Pemilihan Umum di Kampung Adat Naga Desa Negalasari Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya tahun 2015 menunjukan angka partisipasi yang cukup tinggi yaitu hingga mencapai 89%, hal ini dapat dilihat pada jumlah pemilih yang menggunakan hak politiknya. Adapun faktor yang mendukung fenomena politik ini diakibatkan dari terbentuknya kesadaran dan antusiasme masyarakat yang mandiri untuk menggunakan hak politiknya, dengan pertimbangan bahwa calon yang hadir dalam pentas Pileg dan Pilpres cukup memiliki kapasitas dalam mewujudkan harapan mereka. Melihat kandidat yang saat itu ikut bertarung didalam Pilpres adalah figur-figur yang dianggap memiliki kapasitas adalah sebuah alasan yang sebenarnya rasional dan kritis. Hal ini dapat dikatakan demikian apabila ditinjau dari alasan masyarakat kenapa menganggap calon yang hadir cukup memenuhi kapasitas dalam memenuhi keinginan masyarakat. Seperti yang diungkapkan oleh sebagian besar warga yang diwawancara terkait dengan alasan mereka ikut berpartisipasi dalam pemilu yang mengatakan bahwa, para calon kali ini cukup dekat dengan masyarakat, mereka selalu turun ke lapangan, rajin berkunjung, kadang-kadang dalam sehari ada beberapa tim sukses dari calon yang bersaing mendatangi mereka. Kedatangannya pun sering membawa sesuatu bagi masyarakat. Ini membuat masyarakat selalu menunggu-nunggu kehadiran para tentunya dan tentunya hari pelaksanaan pemilihan.

Hal ini berbeda dengan fenomena pada beberapa daerah lain di Indonesia. Akibat perilaku para kandidat telah menimbulkan rasa apriori yang berakibat pada apatisme masyarakat dalam berpartisipasi Tapi dalam perjalannya bila kita telisik lebih jauh lagi kebanyakan alasan masyarakat tidak menggunakan hak suaranya dikarenakan adanya kepentingan individual lainnya, baik hari libur dalam pemilihan dijadikan momentum untuk liburan atau tidak memiliki waktu karena kesibukan akan urusan pribadi. Di sisi lain kita juga akan melihat bahwa mereka yang tidak menggunakan hak suaranya lebih kepada karena calon yang hadir tidak memiliki kedekatan secara suku sebuah ciri politik primordialisme yang masih saja ada di tengah pentas politik di Indonesia.

b) Peran Media Massa

Peran media dalam demokrasi sangat penting. Media diharapkan dapat menjalankan fungsi tidak hanya sebagai sumber informasi namun juga diharapkan dapat menjadi sarana dalam pendidikan politik. Isi media dalam memberikan informasi secara luas mengenai Pilpres 2019 juga mendorong terciptanya kesadaran orang untuk menentukan pilihannya. Sebaliknya jika media rendah intensitasnya dalam memberitakan peristiwa politik, khususnya informasi tentang penyelenggaraan Pilpres 2019 dapat mendorong rendahnya keterlibatan masyarakat didalam Pilpres 2019.

Pada saat Pilpres 2019 di Kampung Adat Naga Desa Negalasari Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya berlangsung, media telah dapat dikatakan cukup berhasil dalam menjalankan fungsinya. Hal ini dapat

dibuktikan dari tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi sebagai akibat dari agitasi media terhadap Pilpres 2019. Pemberitaan yang dilakukan secara terus menerus bahkan penyediaan kolom komentar pada sosial media ketika sosialisasi Pilpres 2019 maupun sarana kampanye bagi para kandidat saat itu merupakan salah satu indkator peran media dalam mensukseskan Pilpres 2019 di Kampung Adat Naga Desa Negalasari Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya. Hal ini sebagaimana yang diungkapkan oleh salah anggota KPPS Desa Neglasari, beliau menuturkan bahwa masyarakat adat di Kampung Naga sangat rajin mengikuti perkembangan proses Pilpres 2019 melalui media massa. Hal ini menjadi salah satu keuntungan bisnis bagi media, sehingga pemberitaan dilakukan secara terus menerus. Ini telah menjadi salah satu bentuk sosialisasi kepada masyarakat, sehinnga masyarakat tahu dengan pasti tentang proses Pilpres 2019."

c) Kinerja KPUD

Salah satu faktor yang juga menjadi pendorong tingginya tingkat partisipasi politik masyarakat pada Pilpres 2019 di Kampung Adat Naga pada tahun 2019 lalu yakni peran dari penyelenggara yaitu KPUD kabupaten Tasikmalaya. Penataan daftar pemilih tetap (DPT) yang baik sangat mendukung tingginya partisipasi politik. Sementara persoalan ini sering menjadi masalah selama pelaksanaan Pilpres 2019 karena banyaknya warga yang sering tidak terdaftar sehingga menjadi sebuah permasalahan krusial yang tidak mendapatkan solusi. Factor pendorong lain akibat peran dari KPUD adalah kesuksesan dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

d) Peran Kandidat

Faktor yang juga sangat berpengaruh pada tingginya tingkat partisipasi politik masyarakat pada Pilpres 2019 di Kampung Naga adalah strategi yang dijalankan oleh sebagian besar dari para kandidat yang bersaing kala itu. Strategi *money politik* telah berhasil mendongkrak tingkat partisipasi politik saat itu. Hal itu mendapat dukungan dari tingkat pragmatisme politik masyarakat Adat Kampung Naga yang dikenal sangat tinggi.

e) Faktor Sosial Budaya

Faktor yang juga sangat berpengaruh pada partisipasi politik adalah faktor sosial dan budaya yang berkembang dan dianut oleh masyarakat. Pragmatisme merupakan sebuah budaya yang cukup subur tumbuh di negara ini. Ini berdasarkan beberapa literatur dan penelitian yang pernah ada dan sudah dilakukan menunjukan fakta bahwa pragmatisme masyarakat dalam mengikuti

pemilu sangat besar. Dan bisa dipastikan budaya tersebut memang sudah menjadi adat atau kebiasaan yang berkembang sudah cukup lama ditengah masyarakat.

Pragmatisme yang ada dalam masyarakat dapat dibuktikan pada setiap pelaksanaan pemilu, dimana *money politics* selalu saja marak pada setiap pelaksanaan pemilu. Hal itu dilakukan dengan sadar oleh para kandidat yang bersaing dalam pemilu, karena strategi tersebut terbukti sangat manjur dalam melakukan penjaringan dukungan masyarakat pemilih. Di Kampung Naga permasalahan ini juga diakui oleh beberapa informan bahwa fenomena politik uang saat Pilpres 2019 lalu sangat tinggi. Mereka mengaku hampir semua kandidat yang bertarung melakukan strategi tersebut. Besaran uang yang diberikan juga cukup bervariasi. Dan itu dilakukan oleh para kandidat tim sukses mereka.

Berdasarkan dari uraian diatas mengenai konsep-konsep dalam memperhatikan perilaku politik masyarakat, maka dalam hasil wawancara dengan para informan, peneliti mengungkapkan bahwa perilaku politik masyarakat Kampung Naga sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang telah diuraikan diatas. Sehingga perilaku politik yang berkembang pada masyarakat adat seperti Kampung Naga ini sangat kental dengan pengaruh historis yang ditunkan secara turun temurun dan dikawal dengan norma-norma agama yang kuat dipegang oleh masyarakat tersebut.

Dari perilaku politik itulah kita bisa melihat tingkat parisipasi politik masyarakat Kampung Naga yang berkembang sampai saat ini. Maka didalam

menentukan jenis partisipasi politik masyarakat Kampung Naga, peneliti menggunakan teori yang diungkapkan dalam buku Budi Suryadi, S.Sos., M.Si (2007 : 139) bahwa tingkatan partisipasi politik terbagi dalam beberapa hierarki diantaranya sebagai berikut :

1. Menduduki jabatan politik atau administrative
2. Mencari jabatan politik politik atau administrative
3. Keanggotaan aktif suatu organisasi politik
4. Keanggotaan pasif suatu organisasi politik
5. Keanggotaan aktif suatu organisasi semu politik
6. Keanggotaan pasif suatu organisasi semu politik
7. Partisipasi dalam rapat umum, demonstrasi dan sebagainya
8. Partisipasi dalam diskusi politik informal, minat umum dalam politik
9. Voting (pemberian suara)
10. Apathi total

Maka berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti terhadap warga Kampung Naga mengenai bentuk partisipasi politik yang berkembang pada mereka adalah partisipasi politik Voting (pemberian suara). Hal itu terlihat dari hasil penelitian peneliti terhadap warga dan ternyata setelah digali lebih mendalam, sebagian besar dari warga Kampung Naga bahkan bisa dikatakan seluruh warga disana mangikuti proses politik dalam pemilihan umum 2019. Namun meskipun mereka mengikuti proses pemilihan umum, mereka tetap berpendapat bahwa yang mereka lakukan bukan untuk mendukung atau tidak mendukung pihak manapun, dalam artian mereka bisa dimasukan pada partisipasi politik pasif.

Partisipasi politik warga masyarakat adalah salah satu prinsip dasar dan sekaligus kunci yang wajib dipegang dalam masyarakat demokrasi. Partisipasi politik masyarakat merupakan suatu bentuk kegiatan yang bersifat empirik, bukan semata sikap atau kecenderungan warga negara biasa yang bermain dalam wilayah pemerintahan yang bertujuan mempengaruhi proses pengambilan keputusan *(decision making)*. Keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses politik menjadi syarat mutlak, karena partisipasi itu akan melahirkan kontrol masyarakat atas jalannya pemerintahan.

Dari hasil temuan dilapangan, setidaknya ada kesepahaman mengenai partisipasi politik masyarakat kampung naga anggapan bahwa partisipasi politik hanya dimaknai sebagai keterlibatan warga masyarakat dalam kegiatan pemilihan umum, baik dalam kampanye maupun dalam memberikan hak suaranya sudah sangat umum dipahami oleh masyarakat Kampung Naga, begitu juga dengan aparat pemerintah desa, meskipun memahami bahwa partisipasi politik membutuhkan keterlibatan aktif dalam bidang politik, namun tetap menyebutkan kegiatan pemilihan umum sebagai bentuk dari partisipasi politik.

Meskipun tidak bisa secara jelas dikatakan sebagai partisipasi tidak aktif, dari pemahaman mengenai partisipasi politik masyarakat Kampung Naga bisa di kategorikan dengan apa yang disebut oleh Lester W. Milbrath (1960) sebagai partisipasi spectator, yakni partisipasi yang setidak-tidaknya hanya dilakukan dengan memberikan suara dalam pemilihan umum atau yang lebih dikenal sebagai partisipasi pasif. Partisipasi pasif ini bisa dilihat dari tindakan

masyarakat yang merasa tidak tahu ataupun tidak mampu melakukan mengenai kegiatan politik tersebut.

Berdasarkan uraian diatas jelas bahwa partisipasi politik masyarakat adat di Kampung Naga menguatkan teori hierarki tingkatan partisipasi politik yang dikutif oleh Budi Suryadi, S.Sos., M.Si (2007:139) yang menyebutkan bahwa Kegiatan pemberian suara dapat dianggap sebagai bentuk partisipasi politik aktif yang paling kecil, karena hal itu menuntut suatu keterlibatan minimal, yang akan berhenti jika pemberian suara telah terlaksana. Lagi pula, tanpa melihat adanya pembatasan-pembatasan lainnya, kegiatan pemberian suara itu tidak boleh dibatasi oleh seringnya pemilihan. Dengan demikian berdasarkan dari uraian-uraian diatas, maka dengan memperhatikan partisipasi politik masyarakat Adat Kampung Naga.

Orientasi politik masyarakat Kampung Naga hanya sebatas mengikuti peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah tanpa di iringi dengan pemahaman yang cukup mengenai sistem maupun perjalanan perpolitikan bangsa ini. Seperti yang diungkapkan oleh ketua Adat Kampung Naga Bapak Ucu Suherrlan bahwa dalam beberapa kali proses demokratisasi yang sudah dijalankan di negeri ini, bisa dikatakan 99% masyarakat Kampung Naga mengikuti proses politik tersebut. Namun dibalik keikutsertaan mereka tidak lebih dari sekedar ikut saja dan menyalurkan suaranya, ada sebagian warga yang sudah memahAmi apa, maupun siapa yang harus dipilih. Tapi pada dasarnya mereka menganggap siapapun yang mereka pilih atau siapapun yang terpilih tidak akan merubah sikap, sifat dan adat mereka.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan terhadap hasil penelitian yang dilakukan peneliti pada masyarakat Kampung Naga desa Neglasari Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Respon masyarakat adat kampong naga desa Neglasari Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaua dalam Pemilihan Umum 2019 lalu sangat baik. Masyarakat Adat Kampung Naga antusias dalam menjadi bagian dari pesta demokrasi tersebut. Meskipun perilaku politik masyarakat Kampung Naga kental dengan pengaruh historis yang diturunkan secara turun-temurun dan dikawal dengan norma-norma agama yang kuat namun seiring dengan waktu, masyarakat tercerahkan untuk memberikan respon positif kepada sesuatu yang juga bersifat positif untuk membangun daerahnya, membangun bangsanya, dan itu juga di awali dengan membangun kesadaran berpolitik yang baik dengan memberikan respon-respon yang baik dalam perpolitikan.
2. Dapat peneliti simpulkan bahwa tingkat partisipasi politik masyarakat Kampung Naga adalah partisipasi politik voting atau pemberian suara kepada salah satu kontestan, hal ini merupakan suatu kepercayaan untuk membawa aspirasi pribadi dari setiap masyarakat adat di Kampung Naga, baik jangka pendek maupun jangka panjang namun tanpa mempengaruhi budaya hidup mereka yang telah dianut selama bertahun-tahun. Hal itu terlihat dari pola

pandang mereka terhadap proses politik yang berkembang di negara ini disikapi dengan biasa-biasa saja. Hal itu menunjukan pengaruh kebudayaan lebih kuat dari pada pengaruh kemajuan politik yang berkembang di indonesia.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Penulis berharap semoga penelitian skripsi ini menjadi sebuah pembelajaran yang berharga untuk kita semua, masyarakat Indonesia pada umumnya dan Masyarakat Adat Kampung secara khususnya, untuk lebih cerdas dan memiliki kesadaran yang tinggi dalam perilaku dan berpartisipasi politik. Karena memilih pemimpin adalah tanggung jawab kita semua yang manfaat serta akibanya juga akan menjadi bagian diri kita.
2. Penulis juga menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan dan kesalahan dalam penelitian ini, semoga kritik dan saran membangun dapat menjadi penyemangat untuk memperbaiki di waktu yang akan datang.
3. Terakhir, semoga penelitian ini ada manfaatnya dan menjadi bahan kajian untuk penelitian berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

Agung, Subhan 2017. *Pemerintah Asli Masyarakat Adat, Studi Kepemimpinan Adat di Lembah Timur Ciamis.* Deepublish: Sleman, CV Budi Utama.

Budiardjo, Miriam. 2009. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta

Budi Suryadi, S.Sos., M.Si. 2007. *Sosiologi Politik. Sejarah, Definisi dan Perkembangan Konsep.* Jogjakarta: IRCiSoD.

Dr. Eko Handoyo, M.Si. 2013. *Sosiologi Politik.* Yogyakarta: Ombak.

Echols, John M., dan Hassan Syadily. (1983). *Kamus Inggris-Indonesia*, Cet XII. Jakarta: Gramedia.

Elly M. Setiadi & Usman Kolip 2013. *Pengantar Sosiologi Politik.* Jakarta: Kencana.

Idrus, Muhammad. (2009). *Metode Penelitian Ilmu Sosial.* Jakarta: Erlangga.

Kusmayadi, Edi 2015. *Realitas dan Dinamika Politik Lokal.* Deepublish: Yogyakarta.

Lexy J, Moleong. (2002). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya.

Milles, Mathew dan A Michael Hubberman. (1992). *Analisa Data Kualitatif.* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

P. Anthonius Sitepu 2012. *Teori-Teori Politik.* Yogyakarta; Graha Ilmu.

Rohaniah dan Efriza. 2015. *Pengantar Ilmu Politik.* Malang: Intrans Publishing.

Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D.* Bandung: CV. Alfabeta.

Sumber Internet

http://bpsplpadang.kkp.go.id/masyarakat-adat

https://www.theindonesianinstitute.com/meningkatnya-partisipasi-pemilih-dalam-pemilu-2019/

http://obor.or.id/Adat-dalam-Politik-Indonesia

Sumber Karya Tulis Ilmiah

Ihsan Fathurrahman, Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jendral Soedirman. Partisipasi Masyarakat Adat di Kampung Naga. Penelitian ini dilakukan fokus dalam penelitian ini yaitu mengenai budaya politik di masyarakat adat. Masyarakat adat tersebut bisa dikategorikan ke dalam masyarakat (parokial) yaitu masyarakat yang cenderung pasif,tidak kritis terhadap kekuasaan.

Novia Rahmat, program studi Hukum Islam, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pengaruh Kuncen Dalam Masyarakat Adat Kampung Naga, Desa Neglasari Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya dalam Pemilihan Presiden 2014.

Riza Faisal, Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan, Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Pendidikan Indonesia. Budaya Politik Masyarakat Adat Kampung Naga (Studi Kasus di Masyarakat Adat Kampung Naga Kabupaten Tasikmalaya Dalam Pemilihan Gubernur Jawa Barat Tahun 2013).

LAMPIRAN

KEGIATAN WAWANCARA

Ket : Kegiatan Wawancara Dengan Tokoh Adat Kampung Naga Bulan Februari 2020